

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

2015



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

2015



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2015**

No. Katalog BPS : 4102001.1205
No. Publikasi : 12050.1641
Jumlah Halaman : 63 + vii
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Diterbitkan Oleh:

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat menerbitkan Publikasi "**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015**",. Dalam publikasi ini tersaji informasi mengenai aspek sosial ekonomi, khususnya pembangunan manusia ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dengan terbitnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara serta bagi para perencana dan pemakai data lainnya

Penyelesaian publikasi ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh tim. A khirnya, kepada semua pihak yang telah memberi dukungan atas penerbitan publikasi ini diucapkan terimakasih. Masukan dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data dan pemerhati pembangunan sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini.

Tarutung, Oktober 2016
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Utara
Kepala,



Intan Menggalawati Harahap, S.E M.Si
NIP. 196411102 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	4
1.3. Sistematika Penulisan	4
1.4. Sumber Data.....	5
II. Metodologi	
2.1. Pengertian Indikator.....	8
2.2. Indikator-indikator Pembangunan Manusia.....	10
2.3. Metode Penghitungan IPM.....	12
2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM.....	17
2.5. Ukuran Perkembangan IPM.....	19
2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih.....	20
III. Kondisi Umum dan Sosial Ekonomi	
3.1. Letak Geografis.....	25
3.2. Kependudukan.....	25
3.2.1. Jumlah, laju dan tingkat kepadatan penduduk	26
3.2.2. Struktur umur penduduk dan angka beban tanggung.....	27
3.3. Ketenagakerjaan.....	29
3.4. Penduduk Miskin.....	30
3.5. Pendidikan.....	32
3.6. Kesehatan.....	34
3.7. Struktur perekonomian.....	35

3.7.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	35
3.7.2. PDRB Perkapita.....	36
IV. Perkembangan IPM	
4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara	38
4.2. Peringkat IPM	40
V. Kondisi Komponen IPM	
5.1. Indeks Pengetahuan.....	44
5.2. Indeks Kelangsungan Hidup.....	48
5.3. Indeks Daya Beli.....	50
VI. IPM dan Pembangunan Ekonomi	
6.1. Hubungan IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	53
6.2. IPM dan Pendapatan perkapita.....	55
VII. Kesimpulan dan Saran	
7.1. Kesimpulan.....	59
7.2. Rekomendasi.....	61
7.3. Saran-saran.....	62

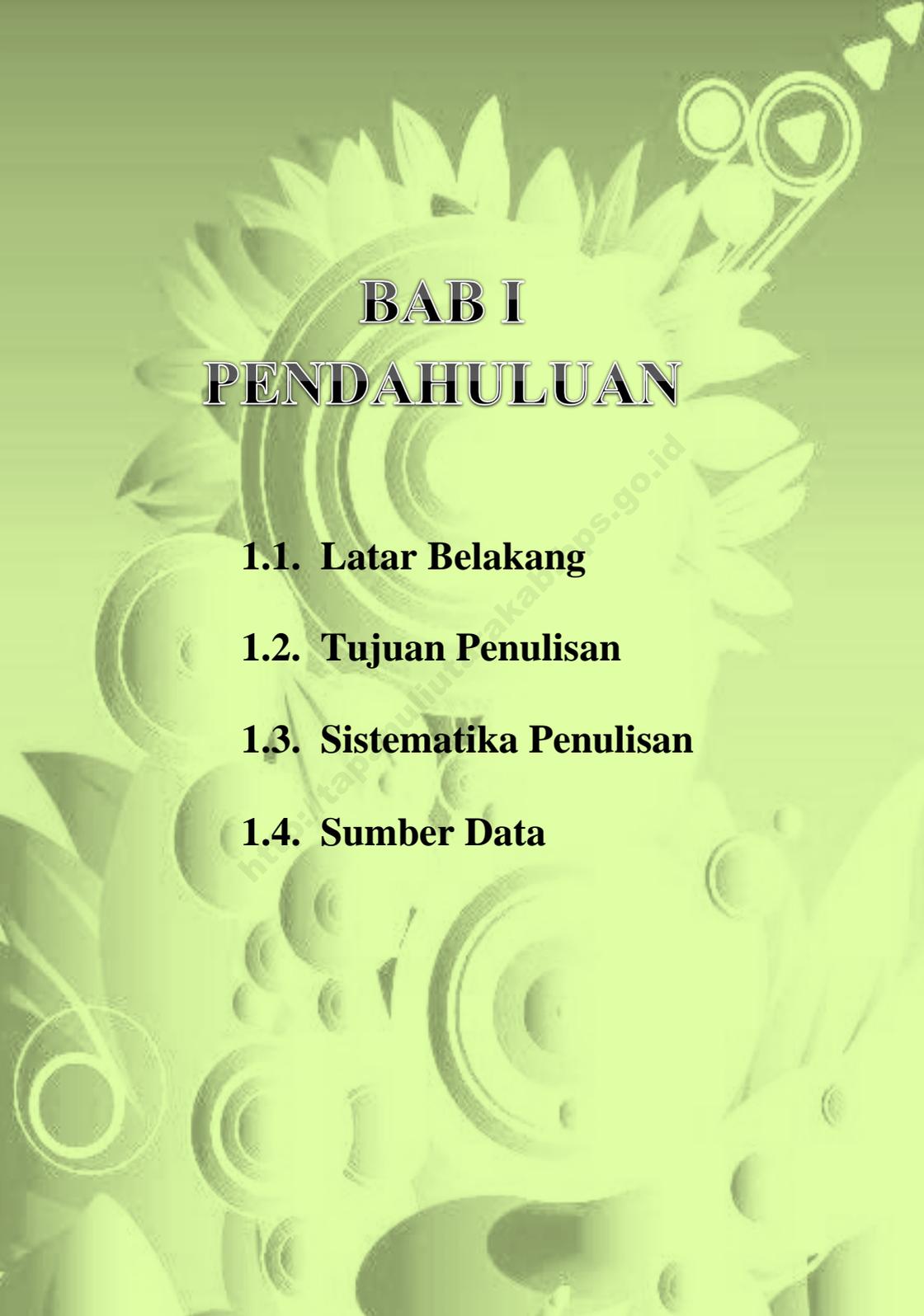
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Daftar Komoditi Terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)	15
Tabel 2.2.	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	19
Tabel 3.1.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	32
Tabel 4.1.	Perkembangan Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	40
Tabel 4.2.	Nilai dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015.....	42
Tabel 5.1.	Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.....	45

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	27
Grafik 3.2. Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	28
Grafik 3.3. Persentase Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014	33
Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	39
Grafik 5.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010–2015	46
Grafik 5.2 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	47
Grafik 5.3. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	49
Grafik 5.4. Rata-rata pengeluaran terkoreksi 2011-2015.....	51
Grafik 6.1. Perkembangan IPM dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2011-2015.....	55
Grafik 6.2. Perkembangan IPM dan PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 -2015.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Penulisan

1.3. Sistematika Penulisan

1.4. Sumber Data

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat (kesehatan). Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

mencerminkan output dari dimensi pengetahuan (pendidikan). Sedangkan untuk indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak (ekonomi).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi

pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk melihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisa IPM tahun 2015. Untuk melihat perkembangan IPM digunakan data IPM pada tahun sebelumnya. Publikasi ini juga menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM dan juga mengulas disparitas IPM antar wilayah.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan:

- 1) Menyajikan perkembangan IPM Kabupaten menurut komponen pembentuk IPM.
- 2) Menyajikan analisis perkembangan IPM antar kabupaten/kota, maupun komponennya.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan kondisi umum dan sosial ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Bab IV menyajikan tentang perkembangan IPM dari tahun ke tahun, sedangkan Bab V menyajikan kondisi komponen IPM. Kemudian Bab VI.

menguraikan hubungan IPM dan Pembangunan Ekonomi, dan Bab VII adalah kesimpulan, rekomendasi dan saran-saran.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan Modul Konsumsi. Sementara sebagai penunjang digunakan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data SUSENAS Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years Schooling/EYS*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling/MYS*). Sementara Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan data SUSENAS yang dikoreksi dengan data SUPAS dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) dihitung menggunakan data SUSENAS Modul Konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi (lihat Tabel 2.1) dan SUSENAS Kor untuk mendapatkan pengeluaran per kapita. Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan IHK sebagai deflator.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Pengertian Indikator

2.2. Indikator-indikator Pembangunan Manusia

2.3. Metode Penghitungan IPM

2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator

Terpilih

BAB II. METODOLOGI

Dewasa ini, pemikiran (paradigma) tentang pembangunan telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*a process of enlarging people's choices*"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi

pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1. Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan disebut sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan

yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;
- 2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda;
- 3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;
- 4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e_1).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti:

rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

- b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- c) Indikator *Output/Outcome*, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, Angka Harapan Hidup, TPAK, IPM dan lain-lain.

2.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini? Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut diatas diperlukan ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

2.3. Metode Penghitungan IPM

Untuk itu menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990.

Saat ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru, mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung

berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah).

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data SUSENAS. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan *Human Development Report* (HDR). Indikator harapan lama sekolah dari partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada metode lama, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sehingga untuk komponen standar hidup layak, PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Namun angka PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ◆ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A) .
- ◆ Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- ◆ Menghitung daya beli per unit (= *Purchasing Power Parity* (PPP)/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.
- ◆ Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basis komoditi yang terdiri dari nilai 96 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).
- ◆ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- ◆ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP/unit = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(g,j)} q_{(i,j)}}$$

dimana,

$E_{(i,j)}$: pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-i

$P_{(g,j)}$: harga komoditi - j di DKI Jakarta (Jakarta Selatan)

$q_{(i,j)}$: jumlah komoditi -j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

**Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih
Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)**

Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah item
MAKANAN	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
TOTAL	100,00	73,63	96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :

- ◆ Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0
- ◆ Luas lantai per kapita : $\geq 10 \text{ m}^2 = 1$, lainnya = 0
- ◆ Dinding : tembok = 1, lainnya = 0
- ◆ Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0
- ◆ Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0
- ◆ Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0
- ◆ Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0
- ◆ Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah $6/8$ atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998:129) yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
&= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
\end{aligned}$$

di mana,

$C_{(i)}$ = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dengan metode baru dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dimana :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$

- $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$

$$I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}$$

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\max} - X_{(i)\min}}$$

Dimana,

$X_{(i)}$: Indikator ke- i ($i = 1, 2, 3$)

$X_{(i)\max}$: Nilai maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i)\min}$: Nilai minimum $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Catatan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Menghitung pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

dimana,

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimpelmentasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

- **Rasio jenis kelamin** : Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan** : Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah** : Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah** : Lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

- **Angka Melek Huruf** : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)
- **Angka Partisipasi Murni SD** : Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD
- **Angka Partisipasi Murni SLTP** : Proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP
- **Angka partisipasi Murni SLTA** : Proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA
- **Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas** : Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- **Jumlah penduduk usia sekolah** : Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun
- **Bekerja** : Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja** : Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** : Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun
- **Angka Pengangguran Terbuka** : Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja
- **Persentase pekerja yang setengah menganggur** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam

dalam seminggu

- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri** : Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap** : Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis** : Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya)
- **Angka Harapan Hidup** : Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk
- **Angka Kematian Bayi** : Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga berlantai tanah** : Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah
- **Persentase rumah tangga beratap layak** : Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan listrik** : Proporsi

rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik

- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding :**
Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih :**
Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik :**
Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik
- **Pengeluaran :** Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
- **Gini Ratio :** Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai *Gini Ratio* terletak antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
- **Penduduk Miskin :** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar
- **Garis Kemiskinan :** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM)

BAB III

KONDISI UMUM

DAN

SOSIAL EKONOMI

3.1. Letak Geografis

3.2. Kependudukan

3.3. Ketenagakerjaan

3.4. Penduduk miskin

3.5. Pendidikan

3.6. Kesehatan

3.7. Struktur Perekonomian

BAB III. KONDISI UMUM DAN SOSIAL EKONOMI

3.1. Letak Geografis

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, berada pada punggung Pegunungan Bukit Barisan (Dataran Tinggi) dengan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara seluas 3.800,31 Km². Luas daratannya 3.793,71 Km² dengan luas perairan Danau Toba 6,60 Km². Ditinjau dari posisinya, Kabupaten Tapanuli Utara terletak pada posisi yang strategis karena berada pada posisi silang dan jalur lintas dari dan ke beberapa daerah kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Batas-batas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Toba Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 Kecamatan. Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 241 desa dan 11 kelurahan.

3.2 Kependudukan

Seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kependudukan atau manusia merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan, sebab subjek dan objek dari

pembangunan itu sendiri adalah manusia atau penduduk yang bermuara kepada terciptanya perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan kualitas hidup dalam kerangka pencapaian tingkat kehidupan yang layak.

Aspek dimensi manusia, tidak saja mencakup kuantitas tetapi juga menyangkut kualitasnya. Kuantitas penduduk yang relatif besar merupakan suatu modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan jika kualitasnya tinggi, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah.

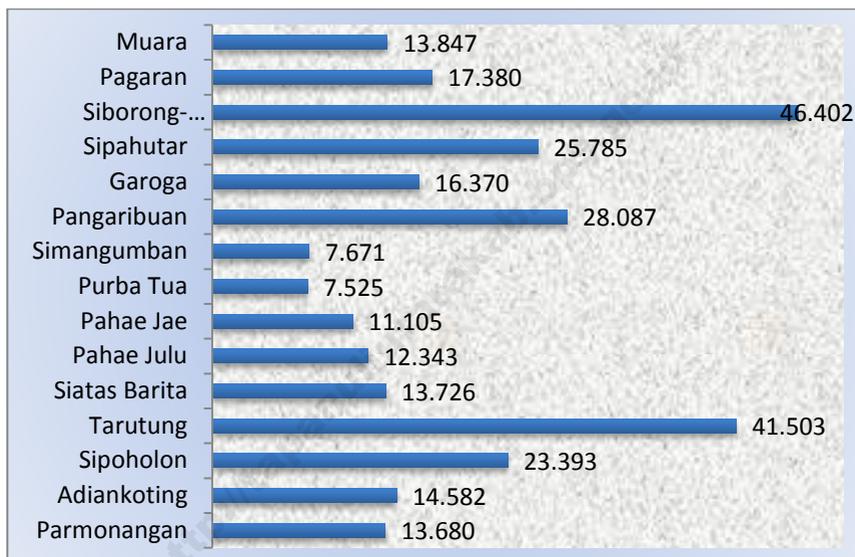
3.2.1 Jumlah, Laju, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Tapanuli Utara dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, tetapi relatif tidak begitu tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 293.399 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 145.105 jiwa dan perempuan sebanyak 148.294 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 290.864 terdiri dari 143.794 dan laki-laki 147.070. Dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penambahan sebesar 2.535 jiwa.

Jika jumlah penduduk dianalisis menurut kecamatan, maka Kecamatan Siborongborong dan Kecamatan Tarutung merupakan dua kecamatan yang memiliki populasi penduduk yang terbesar yaitu masing-masing sebanyak 46.402 jiwa atau 15,81 persen dan 41.503 jiwa atau 14,15 persen dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki populasi penduduk terkecil adalah

Kecamatan Purbatua sebanyak 7.525 jiwa atau 2,57 persen dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Utara. Pada periode 2000-2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tapanuli Utara tercatat sebesar 0,87 persen per tahun.

Grafik 3.1.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



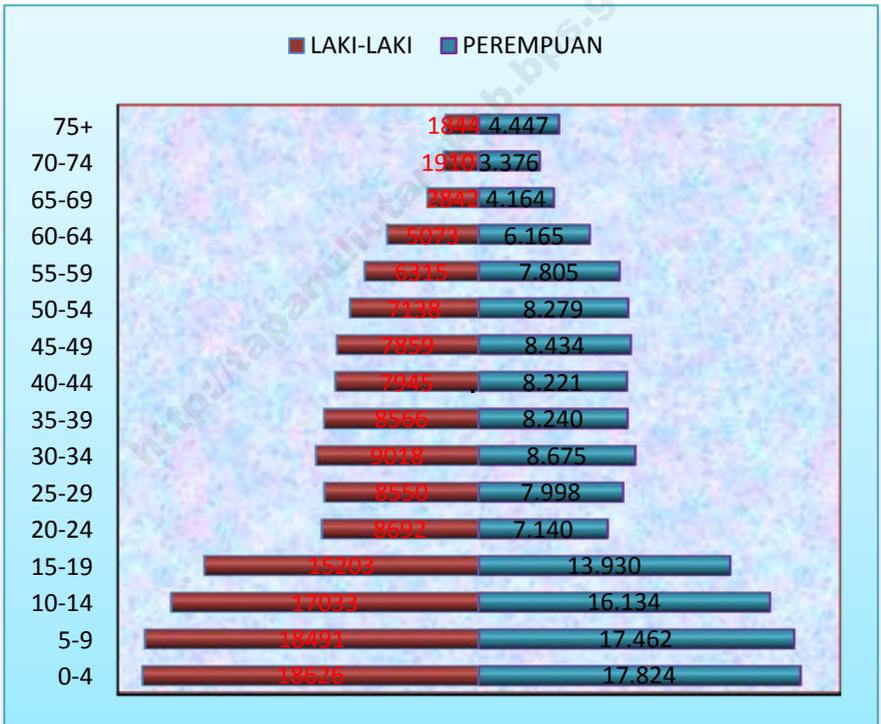
3.2.2 Struktur Umur Penduduk dan Angka Beban Tanggungan

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk di analisis jika dikelompokkan atas tiga kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok umur muda : 0 - 14 tahun,
2. Kelompok umur produktif : 15 - 64 tahun, dan
3. Kelompok umur tua : 65 tahun ke atas.

Struktur umur penduduk dikatakan 'muda' jika proporsi penduduk umur muda sama dengan 40 persen atau lebih, sementara proporsi kelompok umur tuanya kurang dari 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk umur mudanya kurang dari atau sama dengan 30 persen, sementara proporsi kelompok umur tuanya lebih atau sama dengan 10 persen.

Grafik 3.2
Piramida Penduduk
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2015 sebanyak 35,98 persen penduduk Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), sebanyak 57,68 persen merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 6,34 persen.

Dilihat dari kelompok penduduk usia non produktif (anak-anak dan lansia) di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2015 ada sebanyak 42,32 persen. Jumlah tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, sebab kelompok penduduk usia anak-anak merupakan cikal bakal sebagai pengganti generasi yang akan datang. Demikian halnya pada kelompok umur lansia juga perlu mendapatkan perhatian khusus terutama agar mereka mendapatkan perawatan yang layak sehingga mereka merasa tidak menjadi beban dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga.

Dilihat dari Angka Beban Tanggungan Penduduk sebesar 73,37 artinya setiap 10.000 orang penduduk yang aktif secara ekonomi menanggung 7.337 orang penduduk yang secara ekonomi tidak aktif.

3.3 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula

keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015 adalah sebesar 83,57 persen dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas. Jika dilihat menurut jenis kelamin TPAK laki-laki hampir sama dibanding TPAK perempuan yaitu masing-masing 86,35 persen dan 80,97 persen.

Dari struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Utara diketahui bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling dominan, hal ini sesuai dengan keadaan Tapanuli Utara yang merupakan daerah agraris di samping itu berdasarkan data PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 atas dasar harga berlaku, sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 47,61 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut data Susenas 2015 sekitar 84,74 persen penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perburuan sedangkan sektor yang lainnya hanya sebesar 15,26 persen.

Jika kita lihat persentase menurut jenis kelamin maka lebih besar persentase perempuan yang bekerja di sektor pertanian (86,09 persen) dibandingkan persentase laki-laki (83,36 persen).

3.4. Penduduk Miskin

Untuk mengidentifikasi kemiskinan, umumnya dapat di dekati dari 2 (dua) ukuran kemiskinan yaitu : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut biasanya dikaitkan dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) atau yang disebut dengan garis kemiskinan, sedangkan ukuran kemiskinan relatif menunjukkan distribusi pendapatan diantara

berbagai golongan penduduk. Kedua ukuran kemiskinan ini saling melengkapi satu sama lain. Di Indonesia kedua ukuran tersebut di hitung oleh BPS dengan pendekatan data pengeluaran rumah tangga hasil Susenas.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2004 BPS memperkirakan sekitar 48.900 jiwa atau 19,16 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara 2.100 kkal per kapita sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan transportasi. Jumlah ini bertambah pada tahun 2006 sebesar 55.721 jiwa penduduk atau 21,73 persen. Peningkatan ini dipengaruhi akibat kenaikan BBM awal Maret 2005 dan Oktober 2005. Kemudian ada sedikit penurunan pada tahun 2007 menjadi sebesar 52.400 jiwa penduduk atau sebesar 20,06 persen dari total jumlah penduduk Tapanuli Utara. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 37.520 (14,15 persen) dan menurun pada tahun 2009 sebanyak 35.090 (13,10 persen). Kemudian sedikit menurun lagi pada tahun 2010 menjadi 34.900 orang (12,50 persen), juga menurun lagi tahun 2011 menjadi sebesar 33.570 orang atau 11,89 persen dan menurun lagi pada tahun 2012 yaitu 32.600 orang atau 11,55 persen, tetapi naik pada tahun 2013 menjadi 33.800 jiwa

atau 11,68 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 32.230 jiwa atau 11,06 persen.

3.5 Pendidikan

Salah satu dari tiga pilar pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sektor pendidikan. Pada salah satu misi pembangunannya dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara **'Menuju Bona Pasogit yang Indah dan Sejahtera'** disebutkan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bersama-sama dengan masyarakat adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015

Usia	L	P	L+P
7-12 tahun	100,00	100,00	100,00
13-15 tahun	99,19	95,42	97,33
16-18 tahun	82,81	88,17	85,46
19-24 tahun	14,16	28,12	20,00
7-15 tahun	99,75	98,57	99,18
7-24 tahun	83,94	88,23	85,98

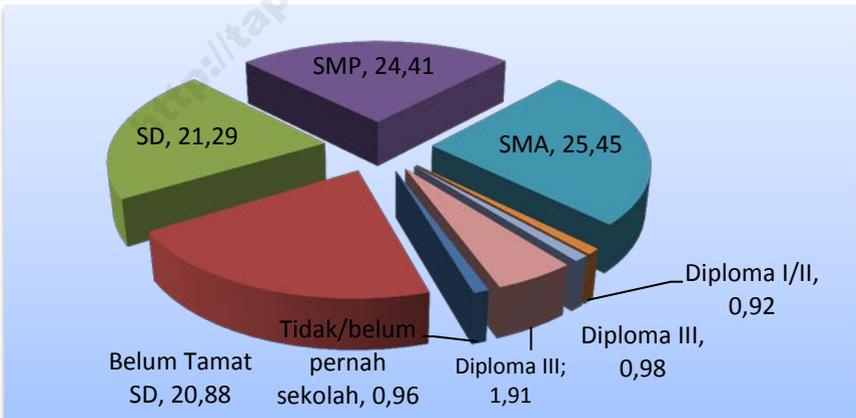
Sumber : Hasil Susenas 2015

Jika dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut tingkatan usia, bahwa pada usia 7-12 tahun APS masih sangat bagus yaitu 100,00 persen, kemudian naik pada APS 13-15 tahun yaitu 97,33 persen, menurun lagi pada APS 16-18 tahun yaitu 85,46 persen dan jauh

semakin menurun pada APS 19-24 tahun yang hanya mencapai 20,00 persen. Karena tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat juga oleh tersedianya fasilitas yang mendukung.

Persentase penduduk yang menamatkan suatu jenjang pendidikan cenderung semakin mengecil sejalan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat SD sebesar 21,29 persen, kemudian sedikit naik pada jenjang SMP 24,41 persen kemudian menurun pada setiap jenjang di atasnya berturut-turut SMA 25,45 persen, Diploma I/II 0,92 persen, Diploma III 0,98 persen, kemudian naik pada jenjang Diploma IV/S1 5,10 persen.

Grafik 3.3.
Persentase Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



3.6 Kesehatan

Seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan juga merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Beberapa indikator penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai barometer derajat kesehatan penduduk Tapanuli Utara adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). AKB di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2005-2010 mengalami penurunan, yaitu dari 29,69 persen tahun 2005 menjadi 28,28 persen tahun 2006, dan 26,50 persen pada tahun 2007, kemudian menurun lagi menjadi 25,6 persen tahun 2008, dan menurun lagi tahun 2010 menjadi 24,3 persen.

Sejalan dengan penurunan AKB, maka AHH menunjukkan kenaikan. Angka harapan hidup dengan menggunakan metode baru pada tahun 2010 sebesar 66,76 tahun, tahun 2011 sebesar 66,91 tahun, tahun 2012 sebesar 67,05, pada tahun 2013 sebesar 67,15 tahun, tahun 2014 sebesar 67,25 tahun dan pada tahun 2015 sebesar 67,55 tahun.

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

3.7 Struktur Perekonomian

3.7.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil pembangunan, merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Ukuran yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita.

Perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik yang ditunjukkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat sebesar 4.196,26 milyar rupiah, meningkat lagi menjadi 4.606,31 milyar rupiah pada tahun 2012, mencapai 4.984,01 milyar rupiah pada tahun 2013, lalu pada tahun 2014 mencapai 5.383,64 milyar rupiah, dan pada tahun 2015 kinerja Kabupaten Tapanuli Utara mencapai 5.828,15 milyar rupiah. Demikian juga dengan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, tahun 2011 sebesar 4.002,39 milyar rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi 4.198,63 milyar rupiah, tahun 2013 meningkat menjadi 4.419,77 milyar rupiah, tahun 2014 mencapai 4.645,42 milyar rupiah, dan pada tahun 2015 mencapai 4.868,95, tumbuh rata-rata sebesar 4,81 persen per tahun dan pada tahun 2015.

3.7.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi makro sebagai ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah dapat di lihat dari angka PDRB per kapita.

PDRB per kapita per tahun Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 PDRB per kapita sebesar Rp.14.829.241,70, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.16.115.964,89, meningkat lagi menjadi sekitar Rp.17.279.972,58 pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi Rp.18.509.155,15 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.19.864.253,52 Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2011-2015 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2011, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.144.141,55, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.14.689.627,65, meningkat lagi menjadi sekitar Rp.15.323.719,27 pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi Rp.15.971.111,92 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.16.594.991,17.



BAB IV

PERKEMBANGAN

IPM

4.1. Perkembangan IPM

4.2. Peringkat IPM

BAB IV. PERKEMBANGAN IPM

Dalam analisis, angka IPM kurang memiliki makna apabila tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya dan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam analisis IPM akan diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah .

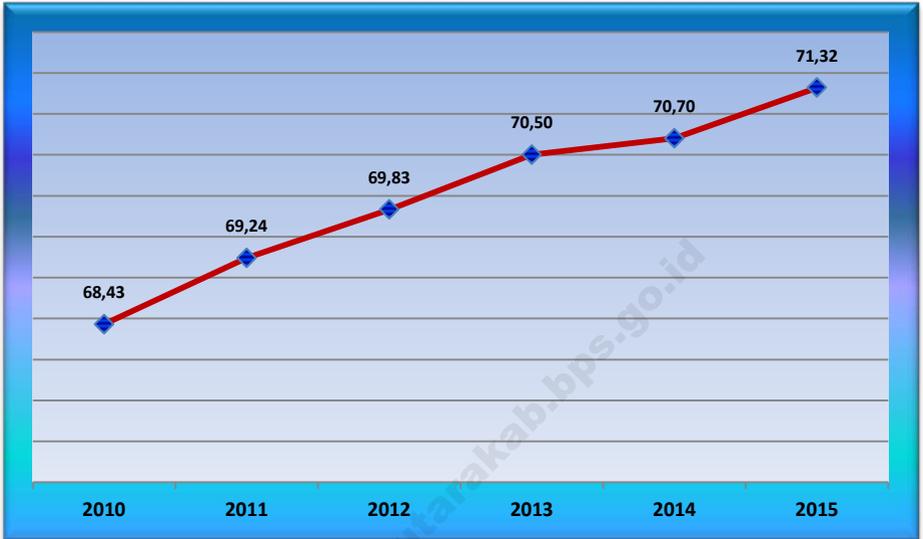
Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan Pemerintah adalah penentuan Dana Perimbangan Wilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggunakan data IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah.

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara beserta komponennya, dan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara.

4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum pembangunan manusia di Tapanuli Utara selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan meskipun level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara terlihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4. 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 - 2015



Klasifikasi IPM Tapanuli Utara terlihat mengalami kenaikan setelah pasca krisis 1997 sampai 2000-an, dimana stabilitas ekonomi sudah mulai membaik, status IPM mengalami peningkatan dari 68,43 pada tahun 2010 (klasifikasi sedang), menjadi 69,24 pada tahun 2011 atau naik 0,81 poin dengan klasifikasi IPM kategori sedang, kemudian pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 69,83 (naik 0,59 poin) juga dengan klasifikasi sedang, pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 70,50 atau naik 0,67 poin (klasifikasi tinggi), pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 70,70 dengan klasifikasi tinggi dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 71,32 dengan klasifikasi tinggi.

Tabel 4.1
Perkembangan Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 - 2015

Tahun	IPM	Klasifikasi
2010	68,43	Sedang
2011	69,24	Sedang
2012	69,83	Sedang
2013	70,50	Tinggi
2014	70,70	Tinggi
2015	71,32	Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini menunjukkan betapa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih produktif dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tetapi angka ini masih **belum** berada pada klasifikasi sangat tinggi, berarti masih harus lebih ditingkatkan untuk pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dan bukan menjadi beban pembangunan.

4.2. Peringkat IPM

Sebagai ukuran kemajuan pembanguan manusia di suatu negara atau daerah, Indek Pembangunan Manusia (IPM) biasanya digunakan untuk mengkaji kemajuan pembanguan manusia dalam dua aspek. Aspek pertama perbandingan wilayah relatif terhadap wilayah

yang lain berdasarkan besaran IPM yang dihitung berdasarkan komponen-komponen IPM yang disusun suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia dipelbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang lain adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Peringkat IPM Tapanuli Utara pada tahun 2015 berada di peringkat ke 10 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara (tabel 4.2). Kabupaten/kota yang peringkatnya berada di atas Tapanuli Utara secara berurut adalah Medan (78,87), Pematang Siantar (76,34), Binjai (73,81), Toba Samosir (73,40), Tebing Tinggi (72,81), Padang Sidempuan (72,80), Deli Serdang (72,79), Karo (72,69), dan Sibolga (71,64).

Jika dibandingkan dengan data IPM Sumatera Utara, maka angka IPM Tapanuli Utara masih berada di atas IPM Sumatera Utara yaitu 69,51 dan peringkat IPM Sumatera Utara adalah urutan 10 di Indonesia.

Tabel 4.2 Nilai dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2015

No	Provinsi	IPM		Peringkat IPM	
		2014	2015	2014	2015
SUMATERA UTARA		68.87	69.51	10	10
1	Nias	57.98	58.85	31	31
2	Mandailing Natal	63.42	63.99	29	29
3	Tapanuli Selatan	67.22	67.63	20	20
4	Tapanuli Tengah	66.16	67.06	22	22
5	Tapanuli Utara	70.70	71.32	11	10
6	Toba Samosir	72.79	73.40	3	4
7	Labuhan Batu	70.06	70.23	12	12
8	Asahan	67.51	68.40	19	18
9	Simalungun	70.89	71.24	10	11
10	Dairi	67.91	69.00	16	15
11	Karo	71.84	72.69	8	8
12	Deli Serdang	71.98	72.79	6	7
13	Langkat	68.00	68.53	15	16
14	Nias Selatan	57.78	58.74	32	32
15	Humbang Hasundutan	65.59	66.03	25	25
16	Pakpak Barat	65.06	65.53	28	28
17	Samosir	67.80	68.43	17	17
18	Serdang Bedagai	67.78	68.01	18	19
19	Batu Bara	65.50	66.02	26	26
20	Padang Lawas Utara	66.50	67.35	21	21
21	Padang Lawas	65.50	65.99	27	27
22	Labuhan Batu Selatan	68.59	69.67	14	14
23	Labuhan Batu Utara	69.15	69.69	13	13
24	Nias Utara	59.18	59.88	30	30
25	Nias Barat	57.54	58.25	33	33
26	Kota Sibolga	71.01	71.64	9	9
27	Kota Tanjung Balai	66.05	66.74	23	23
28	Kota Pematang Siantar	75.83	76.34	2	2
29	Kota Tebing Tinggi	72.13	72.81	5	5
30	Kota Medan	78.26	78.87	1	1
31	Kota Binjai	72.55	73.81	4	3
32	Kota Padang Sidempuan	71.88	72.80	7	6
33	Gunung Sitoli	65.91	66.41	24	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

BAB V

KONDISI

KOMPONEN IPM

5.1. Indeks Pengetahuan

5.2. Indeks Kelangsungan Hidup

5.3. Indeks Daya Beli

BAB V. KONDISI KOMPONEN IPM

Perkembangan angka IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/*rate* dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita.

5.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 1990-an pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak upaya pemerintah dalam upaya melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah bertekad memberhasikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dari aspek pendidikan.

**Tabel 5.1. Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015**

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
	SUMATERA UTARA	68.29	12.82	9.03	9,563
1	Nias	68.97	11.77	4.76	6,234
2	Mandailing Natal	61.58	12.77	7.63	9,096
3	Tapanuli Selatan	63.74	13.06	8.27	10,623
4	Tapanuli Tengah	66.59	12.40	8.02	9,555
5	Tapanuli Utara	67.55	13.19	9.31	11,079
6	Toba Samosir	69.14	13.18	10.08	11,535
7	Labuhan Batu	69.36	12.57	8.75	10,356
8	Asahan	67.37	12.49	8.32	10,067
9	Simalungun	70.34	12.69	8.80	10,728
10	Dairi	67.78	12.80	8.69	9,708
11	Karo	70.62	12.22	9.50	11,800
12	Deli Serdang	71.00	12.52	9.48	11,359
13	Langkat	67.63	12.70	7.92	10,364
14	Nias Selatan	67.66	11.96	4.64	6,454
15	Humbang Hasundutan	68.10	13.15	8.90	6,889
16	Pakpak Barat	64.85	13.80	8.45	7,496
17	Samosir	70.26	13.41	8.84	7,698
18	Serdang Bedagai	67.47	12.31	8.08	10,110
19	Batu Bara	65.80	11.96	7.74	9,692
20	Padang Lawas Utara	66.50	11.87	8.91	9,363
21	Padang Lawas	66.31	12.91	8.40	7,955
22	Labuhan Batu Selatan	68.09	12.73	8.68	10,319
23	Labuhan Batu Utara	68.70	12.12	8.31	11,201
24	Nias Utara	68.59	12.40	6.06	5,627
25	Nias Barat	67.94	12.33	5.74	5,207
26	Kota Sibolga	67.70	13.10	9.85	10,765
27	Kota Tanjung Balai	61.90	12.40	9.12	10,326
28	Kota Pematang Siantar	72.29	13.99	10.73	11,388
29	Kota Tebing Tinggi	70.14	12.23	10.06	11,393
30	Kota Medan	72.28	13.97	11.00	14,191
31	Kota Binjai	71.59	13.56	10.28	10,098
32	Kota Padang Sidempuan	68.32	14.48	10.47	9,668
33	Kota Gunung Sitoli	70.29	13.65	8.18	6,742

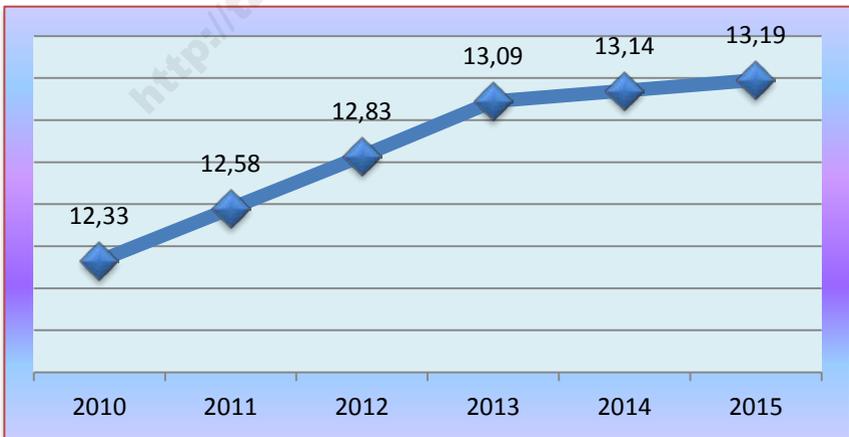
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berkaitan dengan penentuan IPM, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan itu sendiri terdiri dari harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Dari tabel 5.1. bisa dilihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara berada diperingkat 8 untuk harapan lama sekolah, sedangkan yang berada diperingkat 1-7 adalah Padang Sidempuan (14,48), Pematang Siantar (13,99), Medan (13,97), Pakpak Bharat (13,80), Gunung Sitoli (13,65), Binjai (13,56), dan Samosir (13,41).

Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, maka harapan lama sekolah penduduk Tapanuli Utara (13,19), sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara yaitu sebesar 12,82 tahun.

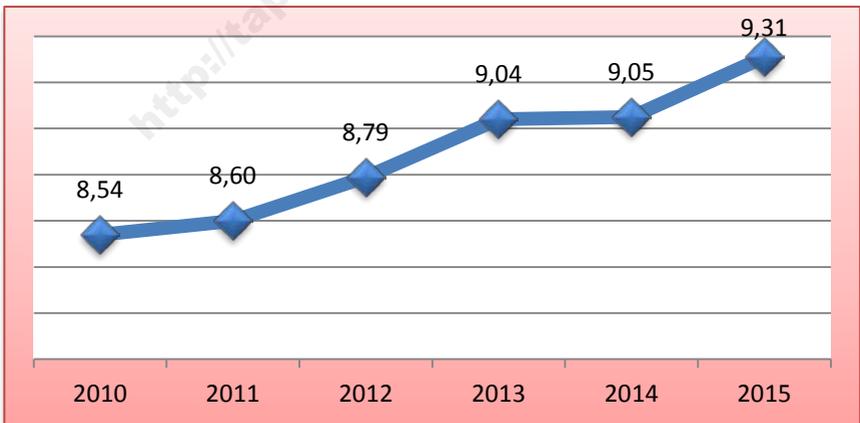
Grafik. 5.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



Jika dilihat grafik 5.1. perkembangan harapan lama sekolah tahun 2010 meningkat sampai tahun 2015.

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan rata-rata jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 9,31 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Tapanuli Utara sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama bahkan sudah duduk di kelas 1 SMA. Ini menjelaskan bahwa program wajib belajar 9 tahun sudah berjalan dengan baik. Dari tahun 2010 ke tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perkembangan yang cukup bagus, dari 8,54 tahun menjadi 9,31 tahun.

Grafik. 5.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara, untuk rata-rata lama sekolah maka Kabupaten Tapanuli Utara berada pada peringkat 10, kabupaten/kota yang berada diperingkat di atasnya adalah Medan (11,00), Pematang Siantar (10,73), Padang Sidempuan (10,47), Binjai (10,28), Toba Samosir (10,08), Tebing Tinggi (10,06), Sibolga (9,85), Karo (9,50), dan Deli Serdang (9,48). Sedangkan rata-rata Sumatera Utara adalah 9,03 tahun.

5.2. Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentu keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak orde baru sampai sekarang antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara umum semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Tapanuli Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2010 sebesar 66,76 tahun, tahun 2011 sebesar 66,91 tahun, tahun 2012 sebesar 67,05 tahun, tahun 2013 sebesar 67,15 tahun, tahun 2014 sebesar 67,25 tahun, dan tahun 2015 sebesar 67,55 tahun. AHH penduduk Tapanuli Utara pada tahun 2015 masih lebih rendah dari rata-rata AHH Sumatera Utara (68,29 tahun).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, tahun 2014 Tapanuli Utara hanya bisa berada di peringkat 23. Kabupaten/Kota di peringkat atas adalah Pematang Siantar (72,29), Medan (72,28), Binjai (71,59), Deli Serdang (71,00), Karo (70,62), Simalungun (70,34), Gunung Sitoli (70,29), Samosir (70,26), Tebing Tinggi (70,14), Labuhan Batu (69,36), Toba Samosir (69,14), Nias (68,97), Labuhan Batu Utara (68,70), Nias Utara (68,59), Padang Sidempuan (68,32), Humbang Hasundutan (68,10), Labuhan Batu Selatan (68,09), Nias Barat (67,94), Dairi (67,78), Sibolga (67,70), Nias Selatan (67,66), dan Langkat (67,63) .

Grafik 5.3. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



5.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan.

Pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing.

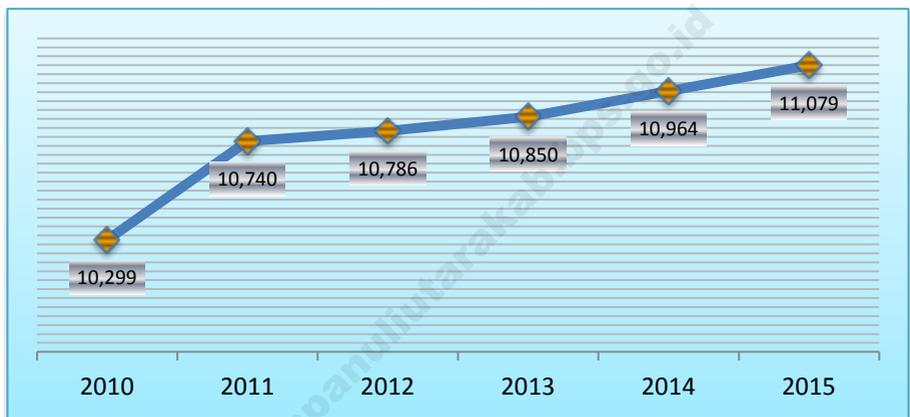
Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

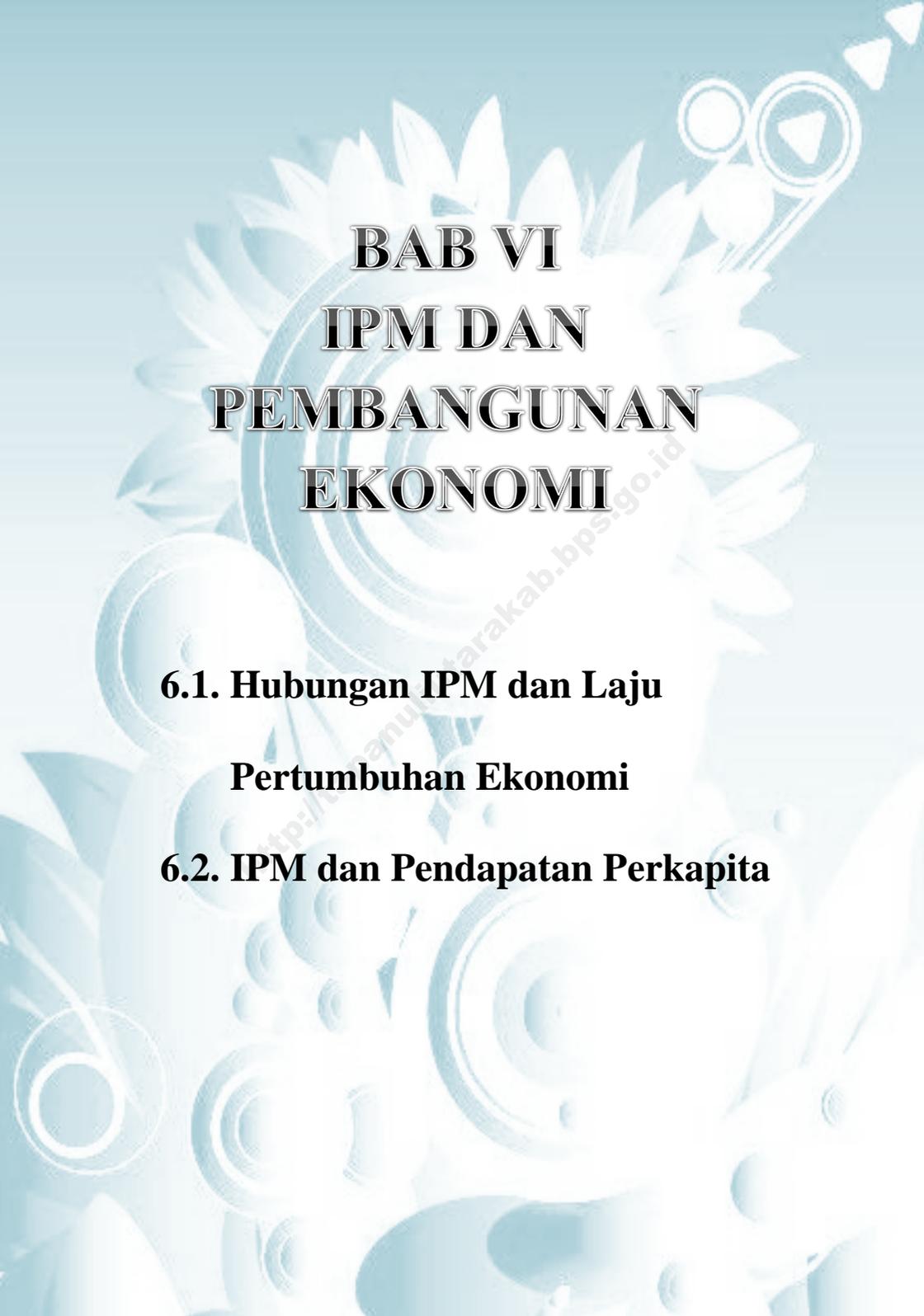
Dari hasil penghitungan, tingkat daya beli penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2010 sampai tahun 2015 terus meningkat. Pada tahun 2010 menjadi 10,299 juta rupiah, meningkat tahun 2011 menjadi 10,740 juta rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi 10,786 juta rupiah, tahun 2013 juga meningkat menjadi 10,850 juta rupiah, pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 10,964 juta rupiah, dan tahun 2015 juga meningkat kembali menjadi 11,079 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara maka Tapanuli Utara berada di peringkat ke-8, setelah Medan

(14,191 juta rupiah), Karo (11,800 juta rupiah), Toba Samosir (11,535 juta rupiah), Tebing Tinggi (11,393 juta rupiah), Pematang Siantar (11,388 juta rupiah), Deli Serdang (11,359 juta rupiah), dan Labuhan Batu Utara (11,201 juta rupiah). Sedangkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 9,563 juta rupiah.

Grafik 5.4. Rata-rata pengeluaran terkoreksi 2010-2015 (juta rupiah)





BAB VI

IPM DAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI

6.1. Hubungan IPM dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi

6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita

BAB VI. IPM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dapat ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang akan dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini akan merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah satu faktor yang menduduki salah satu posisi penting dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan (arti luas), juga meliputi unsur pemantauan, dan evaluasi maka fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya pembangunan yang terarah.

Sebaiknya daerah yang telah memiliki PDRB yang sudah relatif baik fungsi pembangunan adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya tetap kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja

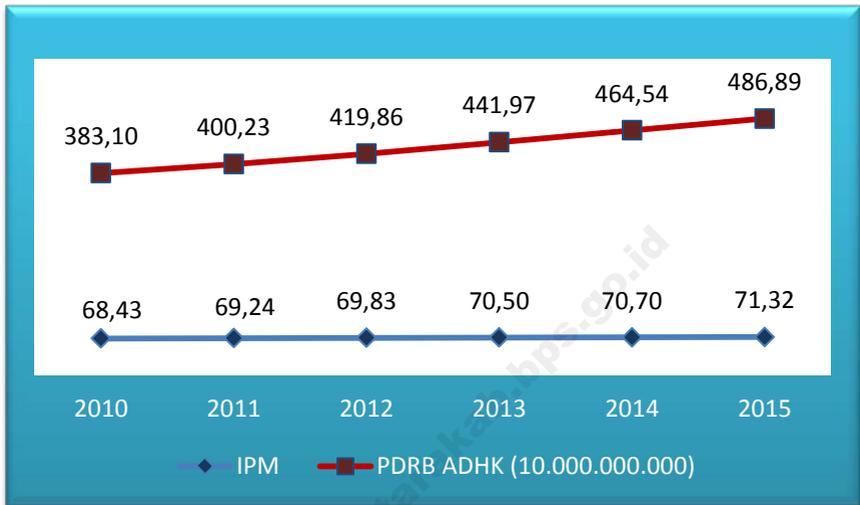
6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi atau khususnya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik dengan pembangunan manusia. Artinya pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika dalam kondisi perekonomian tidak menentu (labil), seperti yang terjadi di

Indonesia pada saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia ini juga memengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan manusia itu sendiri sebagai input, dimana nantinya dihasilkan suatu produk berupa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia dituntut sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan daerahnya.

Hubungan laju pertumbuhan ekonomi (yang dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dan pembangunan manusia seperti terlihat pada grafik 6.1 adalah hubungan yang tidak linier. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang memiliki peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati peringkat yang tinggi juga menurut PDRB. Walaupun kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada kecenderungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena diasumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Tapanuli Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 6.1.
Perkembangan IPM dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Tapanuli Utara 2010-2015



Jika dilihat grafik 6.1. maka bisa disimpulkan bahwa walaupun IPM dan PDRB atas dasar harga konstan bergerak secara linier, tetapi kecepatan kenaikannya berbeda dimana PDRB atas dasar harga konstan sangat cepat kenaikannya jika dibandingkan dengan kenaikan IPM.

6.2 IPM dan Pendapatan Perkapita

Hubungan timbal balik, walaupun tidak bersifat otomatis, antara pembangunan manusia dan pertumbuhan terlihat pada grafik 6.2 yang mengkaitkan secara visual antara IPM dengan PDRB per kapita. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hubungan itu tidak linier tetapi mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut :

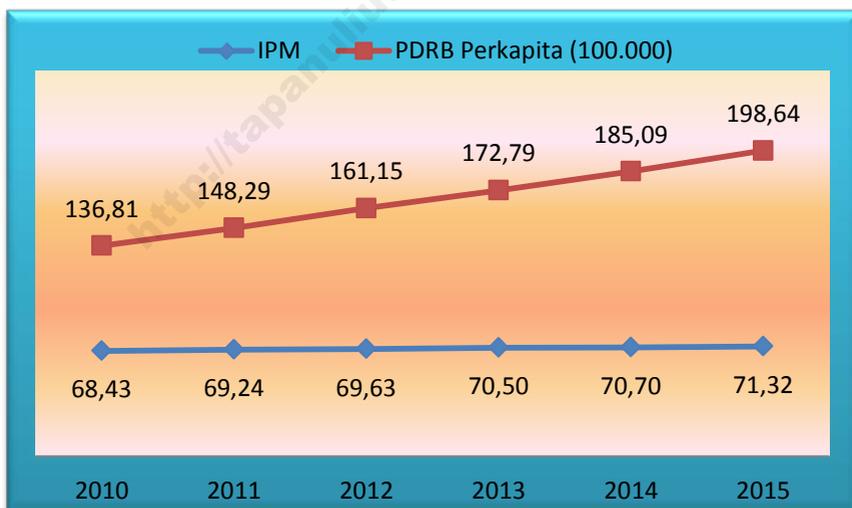
bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah akan berusaha meningkatkan pertumbuhannya dan kenaikan angka tersebut cenderung akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB per kapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena jika kenaikan PDRB tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan menghasilkan perubahan pembangunan manusia.

Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB per kapita. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB per kapita yang sudah relatif tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja (angkatan kerja) dan mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya seperti : sekolah, kesehatan, kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia seperti terlihat pada grafik 6.2 adalah hubungan IPM dengan PDRB perkapita tidaklah linear. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang menempati peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati

peringkat yang tinggi juga menurut PDRB perkapita. Walaupun kenaikan PDRB perkapita tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada kecenderungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena diasumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Tapanuli Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan PDRB perkapita, walaupun dalam hal ini nilai IPM dan PDRB perkapita sama-sama mengalami kenaikan namun tidak selamanya berarti bahwa PDRB perkapita yang tinggi menjamin akan diikuti oleh nilai IPM yang tinggi juga atau dengan kata lain PDRB perkapita dan IPM tidak dapat ditukar.

Grafik 6.2.
Perkembangan IPM dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tapanuli Utara 2010 – 2015





BAB VII

KESIMPULAN

DAN

SARAN

7.1 Kesimpulan

7.2 Rekomendasi

7.3 Saran-saran

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun masih belum merupakan ukuran yang menyeluruh IPM atau *Human Development Index* (HDI) dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau daerah dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
3. Pada tahun 2015 Harapan Lama Sekolah penduduk Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, yaitu masing-masing 13,19 tahun dan 12,82 tahun.
4. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 9,31 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Tapanuli Utara sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama, bahkan telah rata-rata menduduki kelas 1 SMA, dan ini juga menunjukkan program wajib belajar 9 tahun telah tercapai.

5. Tingkat kesehatan makro penduduk Tapanuli Utara pada tahun 2015 masih lebih rendah jika dibanding dengan kondisi Sumatera Utara secara umum. Hal ini dicerminkan oleh angka harapan hidup penduduk Tapanuli Utara yang masih lebih rendah, yaitu masing-masing 68,29 tahun (Sumatera Utara) dan 67,55 tahun (Tapanuli Utara).
6. Standar hidup penduduk Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, hal ini dicerminkan melalui tingkat daya beli penduduk Tapanuli Utara yang lebih tinggi dari penduduk Sumatera Utara secara umum, yaitu masing-masing 11,079 juta rupiah dan 9,563 juta rupiah.
7. Status pembangunan manusia di Tapanuli Utara pada tahun 2015 berada pada klasifikasi tinggi, yaitu pada poin 71,32, atau lebih tinggi dibandingkan status pembangunan manusia Sumatera Utara yang mencapai poin 69,51 (klasifikasi sedang).
8. Terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Tapanuli Utara dalam tiga tahun terakhir (2013-2015), level status pembangunan telah berada pada klasifikasi tinggi, yaitu tercatat sebesar 70,50 pada tahun 2013, 70,70 pada tahun 2014 dan 71,32 tahun 2015.
9. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan IPM tidak berjalan secara otomatis, dan bersifat linier. Ada

kecenderungan dalam jangka panjang peningkatan nilai IPM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pembuatan kebijakan khususnya di bidang pembangunan manusia adalah :

1. Perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, sejalan dengan visi, misi dan tiga pilar pembangunan yang telah ditetapkan guna mencapai wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian diharapkan pendidikan dapat menjadi modal dasar dan motor bagi penduduk Tapanuli Utara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Tapanuli Utara ke depan.
2. Seiring dengan perhatian pada sektor pendidikan, sektor kesehatan juga harus terus menerus diberi perhatian guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Tapanuli Utara.
3. Perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Mengingat pembangunan ekonomi Tapanuli Utara lebih terfokus kepada ekonomi kerakyatan, maka konsep pemberdayaan, produktivitas, pemerataan, dan kesinambungan sangat tepat diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang juga merupakan bagian dari pembangunan manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia mempunyai korelasi–interaksi, oleh karenanya kebijakan menjaga keseimbangan diantara keduanya perlu mendapat perhatian.

7.3. Saran-saran

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Pencegahan (berkurangnya) penduduk keluar dari Tapanuli Utara khususnya penduduk kelompok usia produktif dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengundang penanam modal untuk berusaha di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat mengolah sumber daya yang ada dengan baik yang sekaligus dapat menyerap banyak tenaga kerja serta merangsang tumbuhnya berbagai usaha lainnya yang saling berhubungan dan menguntungkan.
2. Perlunya peningkatan pendidikan secara terus menerus sebagai usaha untuk meningkatkan taraf kualitas penduduk, baik pendidikan formal maupun informal yang dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding Sumatera Utara, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk yang berpendapatan masih relatif rendah dalam

rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih layak haruslah menjadi perhatian khusus Pemerintah.

<http://tapanuliutarakab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA
JL. Sutan Sumurung Lumbantobing No. 7 Tarutung
Telp. (0633) 21153, Fax. (0633) 21755, Email : bps1205@bps.go.id
Homepage : <http://tapanuliutarakab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN TAPANULI UTARA

2015



**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN TAPANULI UTARA
2015**

No. Katalog BPS : 4102001.1205
No. Publikasi : 12050.1641
Jumlah Halaman : 63 + vii
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara

Diterbitkan Oleh:

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin dari Badan Pusat Statistik*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara telah dapat menerbitkan Publikasi "**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015**",. Dalam publikasi ini tersaji informasi mengenai aspek sosial ekonomi, khususnya pembangunan manusia ditinjau dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dengan terbitnya publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara serta bagi para perencana dan pemakai data lainnya

Penyelesaian publikasi ini tidak mungkin terlaksana tanpa kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari seluruh tim. A khirnya, kepada semua pihak yang telah memberi dukungan atas penerbitan publikasi ini diucapkan terimakasih. Masukan dan kritik yang bersifat konstruktif dari pemakai data dan pemerhati pembangunan sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini.

Tarutung, Oktober 2016
Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Utara
Kepala,



Intan Menggalawati Harahap, S.E M.Si
NIP. 196411102 199102 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
I. Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	4
1.3. Sistematika Penulisan	4
1.4. Sumber Data.....	5
II. Metodologi	
2.1. Pengertian Indikator.....	8
2.2. Indikator-indikator Pembangunan Manusia.....	10
2.3. Metode Penghitungan IPM.....	12
2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM.....	17
2.5. Ukuran Perkembangan IPM.....	19
2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih.....	20
III. Kondisi Umum dan Sosial Ekonomi	
3.1. Letak Geografis.....	25
3.2. Kependudukan.....	25
3.2.1. Jumlah, laju dan tingkat kepadatan penduduk	26
3.2.2. Struktur umur penduduk dan angka beban tanggung.....	27
3.3. Ketenagakerjaan.....	29
3.4. Penduduk Miskin.....	30
3.5. Pendidikan.....	32
3.6. Kesehatan.....	34
3.7. Struktur perekonomian.....	35

3.7.1. Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	35
3.7.2. PDRB Perkapita.....	36
IV. Perkembangan IPM	
4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara	38
4.2. Peringkat IPM	40
V. Kondisi Komponen IPM	
5.1. Indeks Pengetahuan.....	44
5.2. Indeks Kelangsungan Hidup.....	48
5.3. Indeks Daya Beli.....	50
VI. IPM dan Pembangunan Ekonomi	
6.1. Hubungan IPM dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	53
6.2. IPM dan Pendapatan perkapita.....	55
VII. Kesimpulan dan Saran	
7.1. Kesimpulan.....	59
7.2. Rekomendasi.....	61
7.3. Saran-saran.....	62

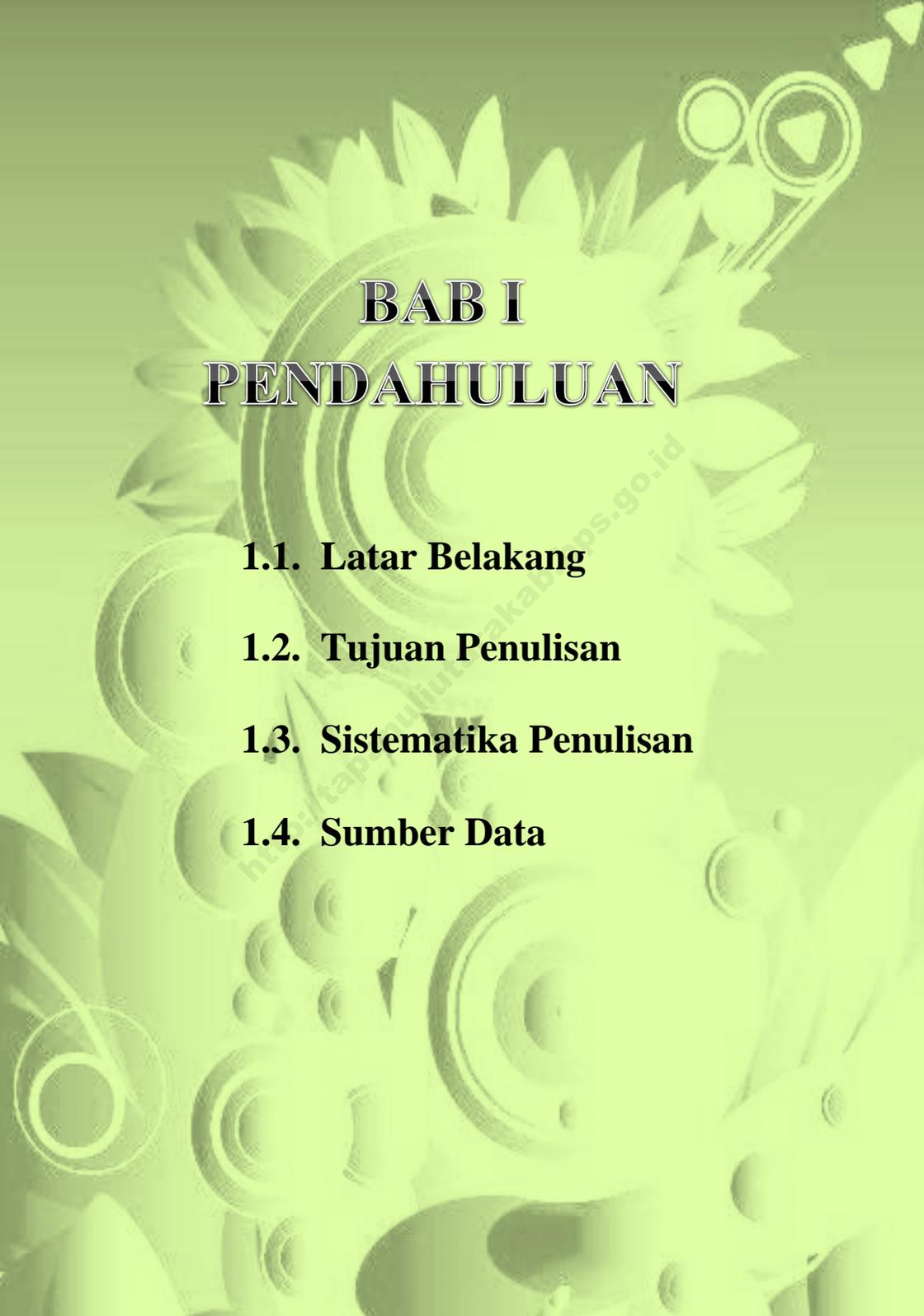
DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Daftar Komoditi Terpilih untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)	15
Tabel 2.2.	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	19
Tabel 3.1.	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	32
Tabel 4.1.	Perkembangan Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	40
Tabel 4.2.	Nilai dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2015.....	42
Tabel 5.1.	Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.....	45

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	27
Grafik 3.2. Piramida Penduduk Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015.....	28
Grafik 3.3. Persentase Jumlah Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014	33
Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	39
Grafik 5.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010–2015	46
Grafik 5.2 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	47
Grafik 5.3. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015.....	49
Grafik 5.4. Rata-rata pengeluaran terkoreksi 2011-2015.....	51
Grafik 6.1. Perkembangan IPM dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2011-2015.....	55
Grafik 6.2. Perkembangan IPM dan PDRB per Kapita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 -2015.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan Penulisan

1.3. Sistematika Penulisan

1.4. Sumber Data

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat (kesehatan). Selanjutnya, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah

mencerminkan output dari dimensi pengetahuan (pendidikan). Sedangkan untuk indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak (ekonomi).

Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (*enlarging the choices of the people*). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampu meningkatkan potensinya. Umumnya, semakin tinggi kapabilitas dasar yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi pula peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Di tengah eskalasi persaingan global, tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi. Jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.

Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.

Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi

pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut. Sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isu pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.

Dengan demikian, cukup menarik untuk melihat pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan selama ini khususnya pada satu dasawarsa terakhir. Selain itu, menarik pula untuk melihat perkembangan masing-masing komponen IPM dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan IPM. Terkait dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, barangkali perlu dilihat hasil-hasil pemerataan pembangunan manusia antar wilayah, khususnya pada level provinsi dan kabupaten/kota.

1.2 Tujuan Penulisan

Secara umum, publikasi ini akan menyajikan data dan analisa IPM tahun 2015. Untuk melihat perkembangan IPM digunakan data IPM pada tahun sebelumnya. Publikasi ini juga menganalisis perkembangan masing-masing komponen IPM dan juga mengulas disparitas IPM antar wilayah.

Secara khusus, publikasi ini bertujuan:

- 1) Menyajikan perkembangan IPM Kabupaten menurut komponen pembentuk IPM.
- 2) Menyajikan analisis perkembangan IPM antar kabupaten/kota, maupun komponennya.

1.3 Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari empat bab. Bab I, menyajikan latar belakang penulisan. Bab ini menguraikan pentingnya IPM sebagai ukuran untuk melihat kemajuan dalam pembangunan manusia. Metodologi penghitungan IPM akan disajikan pada Bab II yang menguraikan tentang metode penghitungan masing-masing komponen sampai terbentuknya IPM. Selanjutnya pada Bab III akan disajikan kondisi umum dan sosial ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara, Bab IV menyajikan tentang perkembangan IPM dari tahun ke tahun, sedangkan Bab V menyajikan kondisi komponen IPM. Kemudian Bab VI.

menguraikan hubungan IPM dan Pembangunan Ekonomi, dan Bab VII adalah kesimpulan, rekomendasi dan saran-saran.

1.4. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor dan Modul Konsumsi. Sementara sebagai penunjang digunakan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyeksi Penduduk dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data SUSENAS Kor digunakan untuk menghitung dua indikator pembentuk IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years Schooling/EYS*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling/MYS*). Sementara Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung menggunakan data SUSENAS yang dikoreksi dengan data SUPAS dan Proyeksi Penduduk. Sedangkan indikator daya beli atau *Purchasing Power Parity* (PPP) dihitung menggunakan data SUSENAS Modul Konsumsi yang didasarkan pada 96 komoditi (lihat Tabel 2.1) dan SUSENAS Kor untuk mendapatkan pengeluaran per kapita. Untuk mendapatkan pengeluaran per kapita riil digunakan IHK sebagai deflator.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Pengertian Indikator

2.2. Indikator-indikator Pembangunan Manusia

2.3. Metode Penghitungan IPM

2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator

Terpilih

BAB II. METODOLOGI

Dewasa ini, pemikiran (paradigma) tentang pembangunan telah mengalami pergeseran, yaitu dari pembangunan yang berorientasi pada produksi (*production centered development*) pada dekade 60-an ke paradigma pembangunan yang lebih menekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution growth development*) selama dekade 70-an. Selanjutnya pada dekade 80-an, muncul paradigma pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (*basic need development*), dan akhirnya menuju paradigma pembangunan yang terpusat pada manusia (*human centered development*) yang muncul pada tahun 1990-an.

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1990:1), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia ("*a process of enlarging people's choices*"). Dari definisi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi

pembangunan yang sangat luas. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhannya ekonominya.

Sebagaimana dikutip dari UNDP (1995:118), sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya adalah: Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian; Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka; oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja; Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal; Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan; dan Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

2.1. Pengertian Indikator

Petunjuk yang memberikan indikasi tentang sesuatu keadaan dan merupakan refleksi dari keadaan disebut sebagai Indikator. Dengan kata lain, indikator merupakan variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel ini terutama digunakan apabila perubahan

yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung. Indikator yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) sah (*valid*), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;
- 2) objektif, untuk hal yang sama, indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda;
- 3) sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;
- 4) spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud.

Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya terdiri dari satu indikator, seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Mutu Hidup (IMH) yang merupakan gabungan dari 3 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), angka kematian bayi (AKB) dan angka harapan hidup dari anak usia 1 tahun (e_1).

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok indikator, yaitu:

- a) Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti:

rasio murid-guru, rasio murid-kelas, rasio dokter, rasio puskesmas.

- b) Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata jumlah jam kerja, rata-rata jumlah kunjungan ke puskesmas, persentase anak balita yang ditolong dukun.
- c) Indikator *Output/Outcome*, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu program kegiatan telah berjalan, seperti: persentase penduduk dengan pendidikan SMTA ke atas, AKB, Angka Harapan Hidup, TPAK, IPM dan lain-lain.

2.2. Indikator-Indikator Pembangunan Manusia

Upaya untuk mengetahui dan mengidentifikasi seberapa besar kemajuan pembangunan yang telah dicapai suatu wilayah tentunya diperlukan data-data yang cukup *up to date* dan akurat. Data-data yang disajikan diharapkan sebagai bahan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut. Apakah pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu telah secara nyata meningkatkan derajat kesehatan masyarakat? Apakah pembangunan gedung SD juga telah mampu meningkatkan tingkat partisipasi sekolah di wilayah ini? Apakah program Paket Kejar telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis penduduk secara umum? Dalam konteks tersebut diatas diperlukan ukuran-ukuran yang tepat untuk digunakan sebagai indikator. Untuk itu perlu diketengahkan mengenai berbagai ukuran-ukuran yang biasa digunakan sebagai indikator pembangunan.

Berbagai program seperti pengadaan pangan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan dan peningkatan kegiatan olah raga dilaksanakan dalam upaya peningkatan taraf kualitas fisik penduduk. Namun demikian seperti dikatakan Azwini, Karomo dan Prijono (1988:469), tolok ukur yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan (pembangunan) dalam beberapa hal agak sulit ditentukan. Alat ukur yang sering digunakan untuk menilai kualitas hidup selama ini hanya mencakup kualitas fisik, tidak termasuk kualitas non fisik. Kesulitan muncul terutama karena untuk menilai keberhasilan pembangunan non-fisik indikatornya relatif lebih abstrak dan bersifat komposit.

Salah satu pengukuran taraf kualitas fisik penduduk yang banyak digunakan adalah Indeks Mutu Hidup (IMH). Ukuran ini sebenarnya banyak mendapat kritik (Hicks and Streeten, 1979, Rat, 1982, Holidin, 1993a, dan Holidin 1993b) karena mengandung beberapa kelemahan, terutama yang menyangkut aspek statistik dari keterkaitan antar variabel yang digunakannya. Terlepas dari kelemahan tersebut, ada nilai lebih dari IMH yang membuat indikator ini banyak digunakan sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan program pembangunan pada satu wilayah. Nilai lebih dari IMH ini adalah kesederhanaan didalam penghitungannya. Disamping itu, data yang digunakan untuk menghitung IMH ini pada umumnya sudah banyak tersedia. IMH juga bisa dihitung setiap tahun untuk setiap wilayah (nasional, propinsi, maupun kabupaten/kota), sehingga dapat dilakukan perbandingan antar wilayah.

Sejalan dengan makin tingginya intensitas dalam permasalahan pembangunan, kesederhanaan IMH pada akhirnya kurang mampu untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan yang semakin kompleks itu. Untuk itu perlu indikator lain yang lebih representatif dengan tuntutan permasalahan. Dalam kaitan ini, indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM; *Human Development Index*) merupakan salah satu alternatif yang bisa diajukan. Indikator ini, disamping mengukur kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; juga mengukur kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah itu; tercermin dari nilai *purcashing power parity index* (ppp). Jadi indikator IPM terasa lebih komprehensif dibandingkan dengan IMH.

2.3. Metode Penghitungan IPM

Untuk itu menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara berkelanjutan diperlukan satu set indikator komposit yang cukup representatif. IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990.

Saat ini, penghitungan IPM menggunakan metode baru, mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan hidup layak (*decent living*). Peluang hidup dihitung

berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (paritas daya beli dalam rupiah).

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e_0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Komponen pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data SUSENAS. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan *Human Development Report* (HDR). Indikator harapan lama sekolah dari partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Pada metode lama, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sehingga untuk komponen standar hidup layak, PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Namun angka PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- “ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A) .
- “ Mendeflasikan nilai A dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- “ Menghitung daya beli per unit (=Purchasing Power Parity (PPP)/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.
- “ Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basis komoditi yang terdiri dari nilai 96 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 2.1).
- “ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- “ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP/unit = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(g,j)} q_{(i,j)}}$$

dimana,

$E_{(i,j)}$: pengeluaran konsumsi untuk komoditi j di kabupaten ke-i

$P_{(g,j)}$: harga komoditi - j di DKI Jakarta (Jakarta Selatan)

$q_{(i,j)}$: jumlah komoditi -j (unit) yang dikonsumsi di kabupaten ke-i

**Tabel 2.1. Daftar Komoditi Terpilih
Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)**

Kelompok	Share kelompok	Terpilih	
		Share	Jumlah item
MAKANAN	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
TOTAL	100,00	73,63	96

Sumber : Badan Pusat Statistik

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :

- .. Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0
- .. Luas lantai per kapita : $\geq 10 \text{ m}^2 = 1$, lainnya = 0
- .. Dinding : tembok = 1, lainnya = 0
- .. Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0
- .. Fasilitas penerangan : listrik = 1, lainnya = 0
- .. Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0
- .. Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0
- .. Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah $6/8$ atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson (dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998:129) yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{jika } C_{(i)} \leq Z \\
&= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
&= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
\end{aligned}$$

di mana,

$C_{(i)}$ = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z = Threshold atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

2.4. Rumus dan Ilustrasi Penghitungan IPM

Rumus penghitungan IPM dengan metode baru dapat disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Dimana :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

- $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$

- $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$

$$I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}$$

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{X_{(i)\max} - X_{(i)\min}}$$

Dimana,

$X_{(i)}$: Indikator ke- i ($i = 1, 2, 3$)

$X_{(i)\max}$: Nilai maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i)\min}$: Nilai minimum $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan nilai minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352** (Rp)

Catatan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2.5. Ukuran Perkembangan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Menghitung pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

dimana,

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2.6. Beberapa Definisi Operasional Indikator Terpilih

Untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah beragam permasalahan pembangunan manusia selama ini dan bagaimana mengimpelmentasikan program-program pembangunan secara baik dan terukur diperlukan ukuran atau indikator yang handal. Beberapa indikator yang sering digunakan diantaranya adalah :

- **Rasio jenis kelamin** : Perbandingan antara penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan, dikalikan 100.
- **Angka ketergantungan** : Perbandingan antara jumlah penduduk usia < 15 tahun ditambah usia > 65 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun, dikalikan 100.
- **Rata-rata Lama Sekolah** : Lama sekolah (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas.
- **Harapan Lama Sekolah** : Lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

- **Angka Melek Huruf** : Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis (baik huruf latin maupun huruf lainnya)
- **Angka Partisipasi Murni SD** : Proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD
- **Angka Partisipasi Murni SLTP** : Proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP
- **Angka partisipasi Murni SLTA** : Proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA
- **Persentase penduduk dengan pendidikan SLTP ke atas** : Proporsi penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- **Jumlah penduduk usia sekolah** : Banyaknya penduduk yang berusia antara 7 sampai 24 tahun
- **Bekerja** : Melakukan kegiatan/ pekerjaan paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja.
- **Angkatan Kerja** : Penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja** : Perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 10 tahun
- **Angka Pengangguran Terbuka** : Perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja
- **Persentase pekerja yang setengah menganggur** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja kurang dari 35 jam

dalam seminggu

- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri** : Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas dengan status berusaha sendiri
- **Persentase pekerja dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tidak tetap** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status berusaha sendiri dibantu pekerja tak dibayar
- **Persentase pekerja dengan status berusaha dengan buruh tetap** : Proporsi penduduk usia 10 tahun keatas yang berusaha dengan buruh tetap
- **Persentase pekerja dengan status berusaha pekerja tak dibayar** : Proporsi penduduk usia 10 tahun ke atas dengan status pekerja keluarga
- **Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga medis** : Proporsi balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga medis (dokter, bidan, dan tenaga medis lainnya)
- **Angka Harapan Hidup** : Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk
- **Angka Kematian Bayi** : Besarnya kemungkinan bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun, dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup.
- **Persentase rumah tangga berlantai tanah** : Proporsi rumah tangga yang tinggal dalam rumah dengan lantai tanah
- **Persentase rumah tangga beratap layak** : Proporsi rumah tangga yang menempati rumah dengan atap layak (atap selain dari dedaunan).
- **Persentase rumah tangga berpenerangan listrik** : Proporsi

rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik

- **Persentase rumah tangga bersumber air minum leding :**
Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum leding
- **Persentase rumah tangga bersumber air minum bersih :**
Proporsi rumah tangga dengan sumber air minum pompa / sumur / mata air yang jaraknya lebih besar dari 10 meter dengan tempat penampungan limbah / kotoran terdekat
- **Persentase rumah tangga berjamban dengan tangki septik :**
Proporsi rumah tangga yang mempunyai jamban dengan tangki septik
- **Pengeluaran :** Pengeluaran per kapita untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
- **Gini Ratio :** Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai *Gini Ratio* terletak antara 0 yang mencerminkan pemerataan sempurna dan 1 yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
- **Penduduk Miskin :** Penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar
- **Garis Kemiskinan :** Suatu batas dimana penduduk dengan pengeluaran kurang dari batas tersebut dikategorikan sebagai miskin. Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yaitu komponen batas kecukupan pangan (GKM), dan komponen batas kecukupan non makanan (GKNM)

BAB III

KONDISI UMUM

DAN

SOSIAL EKONOMI

3.1. Letak Geografis

3.2. Kependudukan

3.3. Ketenagakerjaan

3.4. Penduduk miskin

3.5. Pendidikan

3.6. Kesehatan

3.7. Struktur Perekonomian

BAB III. KONDISI UMUM DAN SOSIAL EKONOMI

3.1. Letak Geografis

Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, berada pada punggung Pegunungan Bukit Barisan (Dataran Tinggi) dengan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara seluas 3.800,31 Km². Luas daratannya 3.793,71 Km² dengan luas perairan Danau Toba 6,60 Km². Ditinjau dari posisinya, Kabupaten Tapanuli Utara terletak pada posisi yang strategis karena berada pada posisi silang dan jalur lintas dari dan ke beberapa daerah kabupaten lainnya di Sumatera Utara. Batas-batas wilayah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Toba Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
- Sebelah Barat : Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Tengah

Kabupaten Tapanuli Utara terdiri dari 15 Kecamatan. Di Kabupaten Tapanuli Utara terdapat 241 desa dan 11 kelurahan.

3.2 Kependudukan

Seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, kependudukan atau manusia merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pembangunan, sebab subjek dan objek dari

pembangunan itu sendiri adalah manusia atau penduduk yang bermuara kepada terciptanya perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan kualitas hidup dalam kerangka pencapaian tingkat kehidupan yang layak.

Aspek dimensi manusia, tidak saja mencakup kuantitas tetapi juga menyangkut kualitasnya. Kuantitas penduduk yang relatif besar merupakan suatu modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan jika kualitasnya tinggi, namun sebaliknya dapat menjadi beban pembangunan jika kualitasnya rendah.

3.2.1 Jumlah, Laju, dan Tingkat Kepadatan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Tapanuli Utara dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan, tetapi relatif tidak begitu tinggi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 293.399 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 145.105 jiwa dan perempuan sebanyak 148.294 jiwa. Sedangkan untuk tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 290.864 terdiri dari 143.794 dan laki-laki 147.070. Dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Utara mengalami penambahan sebesar 2.535 jiwa.

Jika jumlah penduduk dianalisis menurut kecamatan, maka Kecamatan Siborongborong dan Kecamatan Tarutung merupakan dua kecamatan yang memiliki populasi penduduk yang terbesar yaitu masing-masing sebanyak 46.402 jiwa atau 15,81 persen dan 41.503 jiwa atau 14,15 persen dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Utara, sedangkan kecamatan yang memiliki populasi penduduk terkecil adalah

Kecamatan Purbatua sebanyak 7.525 jiwa atau 2,57 persen dari total penduduk Kabupaten Tapanuli Utara. Pada periode 2000-2010, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tapanuli Utara tercatat sebesar 0,87 persen per tahun.

Grafik 3.1.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



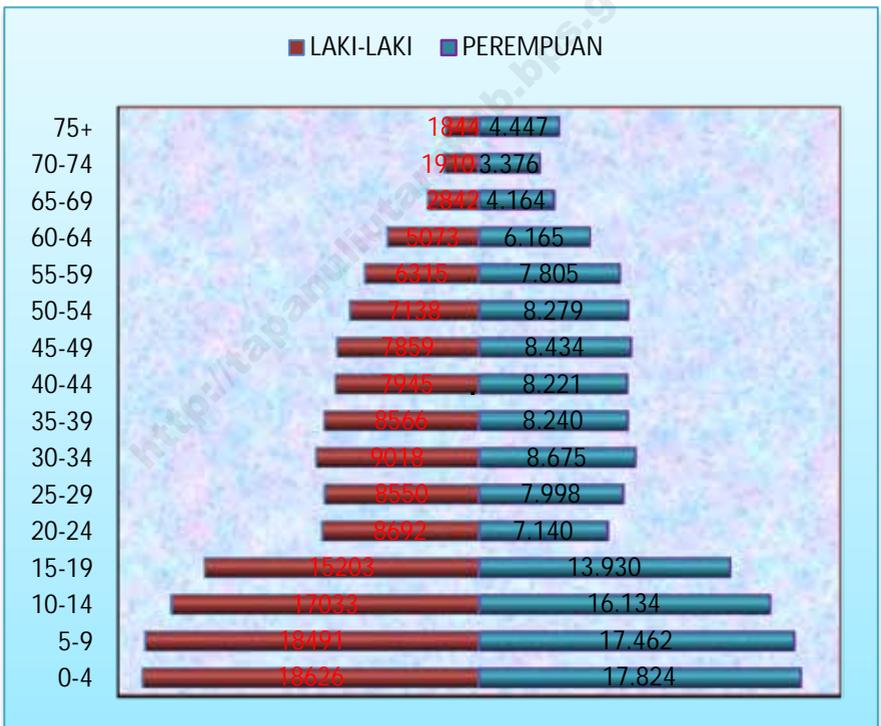
3.2.2 Struktur Umur Penduduk dan Angka Beban Tanggungan

Struktur umur penduduk akan terlihat lebih sederhana untuk di analisis jika dikelompokkan atas tiga kelompok besar, yaitu :

1. Kelompok umur muda : 0 - 14 tahun,
2. Kelompok umur produktif : 15 - 64 tahun, dan
3. Kelompok umur tua : 65 tahun ke atas.

Struktur umur penduduk dikatakan 'muda' jika proporsi penduduk umur muda sama dengan 40 persen atau lebih, sementara proporsi kelompok umur tuanya kurang dari 5 persen. Sebaliknya suatu struktur umur penduduk dikatakan tua jika proporsi penduduk umur mudanya kurang dari atau sama dengan 30 persen, sementara proporsi kelompok umur tuanya lebih atau sama dengan 10 persen.

Grafik 3.2
Piramida Penduduk
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2015 sebanyak 35,98 persen penduduk Kabupaten Tapanuli Utara termasuk dalam kelompok umur anak-anak (0-14 tahun), sebanyak 57,68 persen merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok lanjut usia (65 tahun ke atas) sebanyak 6,34 persen.

Dilihat dari kelompok penduduk usia non produktif (anak-anak dan lansia) di Kabupaten Tapanuli Utara pada Tahun 2015 ada sebanyak 42,32 persen. Jumlah tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat, sebab kelompok penduduk usia anak-anak merupakan cikal bakal sebagai pengganti generasi yang akan datang. Demikian halnya pada kelompok umur lansia juga perlu mendapatkan perhatian khusus terutama agar mereka mendapatkan perawatan yang layak sehingga mereka merasa tidak menjadi beban dalam keluarga maupun di lingkungan sekitar keluarga.

Dilihat dari Angka Beban Tanggungan Penduduk sebesar 73,37 artinya setiap 10.000 orang penduduk yang aktif secara ekonomi menanggung 7.337 orang penduduk yang secara ekonomi tidak aktif.

3.3 Ketenagakerjaan

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula

keterlibatan penduduk usia 15 tahun ke atas ke dalam pasar kerja. TPAK Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015 adalah sebesar 83,57 persen dari seluruh penduduk umur 15 tahun ke atas. Jika dilihat menurut jenis kelamin TPAK laki-laki hampir sama dibanding TPAK perempuan yaitu masing-masing 86,35 persen dan 80,97 persen.

Dari struktur lapangan pekerjaan di Kabupaten Tapanuli Utara diketahui bahwa sektor pertanian merupakan lapangan pekerjaan yang paling dominan, hal ini sesuai dengan keadaan Tapanuli Utara yang merupakan daerah agraris di samping itu berdasarkan data PDRB Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 atas dasar harga berlaku, sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 47,61 persen terhadap total PDRB Kabupaten Tapanuli Utara. Menurut data Susenas 2015 sekitar 84,74 persen penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perburuan sedangkan sektor yang lainnya hanya sebesar 15,26 persen.

Jika kita lihat persentase menurut jenis kelamin maka lebih besar persentase perempuan yang bekerja di sektor pertanian (86,09 persen) dibandingkan persentase laki-laki (83,36 persen).

3.4. Penduduk Miskin

Untuk mengidentifikasi kemiskinan, umumnya dapat di dekati dari 2 (dua) ukuran kemiskinan yaitu : kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut biasanya dikaitkan dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) atau yang disebut dengan garis kemiskinan, sedangkan ukuran kemiskinan relatif menunjukkan distribusi pendapatan diantara

berbagai golongan penduduk. Kedua ukuran kemiskinan ini saling melengkapi satu sama lain. Di Indonesia kedua ukuran tersebut di hitung oleh BPS dengan pendekatan data pengeluaran rumah tangga hasil Susenas.

Tapanuli Utara masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2004 BPS memperkirakan sekitar 48.900 jiwa atau 19,16 persen dari jumlah penduduk Tapanuli Utara hidup dengan pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu jumlah rupiah yang diperlukan untuk membayar harga makanan setara 2.100 kkal per kapita sehari dan pengeluaran minimal untuk perumahan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan transportasi. Jumlah ini bertambah pada tahun 2006 sebesar 55.721 jiwa penduduk atau 21,73 persen. Peningkatan ini dipengaruhi akibat kenaikan BBM awal Maret 2005 dan Oktober 2005. Kemudian ada sedikit penurunan pada tahun 2007 menjadi sebesar 52.400 jiwa penduduk atau sebesar 20,06 persen dari total jumlah penduduk Tapanuli Utara. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebesar 37.520 (14,15 persen) dan menurun pada tahun 2009 sebanyak 35.090 (13,10 persen). Kemudian sedikit menurun lagi pada tahun 2010 menjadi 34.900 orang (12,50 persen), juga menurun lagi tahun 2011 menjadi sebesar 33.570 orang atau 11,89 persen dan menurun lagi pada tahun 2012 yaitu 32.600 orang atau 11,55 persen, tetapi naik pada tahun 2013 menjadi 33.800 jiwa

atau 11,68 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 32.230 jiwa atau 11,06 persen.

3.5 Pendidikan

Salah satu dari tiga pilar pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah sektor pendidikan. Pada salah satu misi pembangunannya dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara **'Menuju Bona Pasogit yang Indah dan Sejahtera'** disebutkan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bersama-sama dengan masyarakat adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015

Usia	L	P	L+P
7-12 tahun	100,00	100,00	100,00
13-15 tahun	99,19	95,42	97,33
16-18 tahun	82,81	88,17	85,46
19-24 tahun	14,16	28,12	20,00
7-15 tahun	99,75	98,57	99,18
7-24 tahun	83,94	88,23	85,98

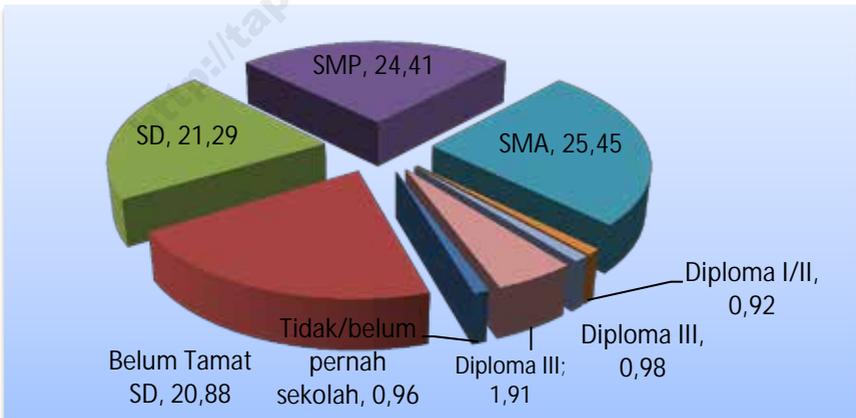
Sumber : Hasil Susenas 2015

Jika dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut tingkatan usia, bahwa pada usia 7-12 tahun APS masih sangat bagus yaitu 100,00 persen, kemudian naik pada APS 13-15 tahun yaitu 97,33 persen, menurun lagi pada APS 16-18 tahun yaitu 85,46 persen dan jauh

semakin menurun pada APS 19-24 tahun yang hanya mencapai 20,00 persen. Karena tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi akan dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi masyarakat juga oleh tersedianya fasilitas yang mendukung.

Persentase penduduk yang menamatkan suatu jenjang pendidikan cenderung semakin mengecil sejalan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang tamat SD sebesar 21,29 persen, kemudian sedikit naik pada jenjang SMP 24,41 persen kemudian menurun pada setiap jenjang di atasnya berturut-turut SMA 25,45 persen, Diploma I/II 0,92 persen, Diploma III 0,98 persen, kemudian naik pada jenjang Diploma IV/S1 5,10 persen.

Grafik 3.3.
Persentase Jumlah Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015



3.6 Kesehatan

Seperti sektor pendidikan, sektor kesehatan juga merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan di Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka upaya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Beberapa indikator penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai barometer derajat kesehatan penduduk Tapanuli Utara adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH). AKB di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode 2005-2010 mengalami penurunan, yaitu dari 29,69 persen tahun 2005 menjadi 28,28 persen tahun 2006, dan 26,50 persen pada tahun 2007, kemudian menurun lagi menjadi 25,6 persen tahun 2008, dan menurun lagi tahun 2010 menjadi 24,3 persen.

Sejalan dengan penurunan AKB, maka AHH menunjukkan kenaikan. Angka harapan hidup dengan menggunakan metode baru pada tahun 2010 sebesar 66,76 tahun, tahun 2011 sebesar 66,91 tahun, tahun 2012 sebesar 67,05, pada tahun 2013 sebesar 67,15 tahun, tahun 2014 sebesar 67,25 tahun dan pada tahun 2015 sebesar 67,55 tahun.

Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan faktor membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan keadaan sosial ekonomi penduduk yang memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup.

3.7 Struktur Perekonomian

3.7.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan hasil pembangunan, merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Ukuran yang sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita.

Perkembangan PDRB Kabupaten Tapanuli Utara setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik yang ditunjukkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010. PDRB Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 tercatat sebesar 4.196,26 milyar rupiah, meningkat lagi menjadi 4.606,31 milyar rupiah pada tahun 2012, mencapai 4.984,01 milyar rupiah pada tahun 2013, lalu pada tahun 2014 mencapai 5.383,64 milyar rupiah, dan pada tahun 2015 kinerja Kabupaten Tapanuli Utara mencapai 5.828,15 milyar rupiah. Demikian juga dengan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, tahun 2011 sebesar 4.002,39 milyar rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi 4.198,63 milyar rupiah, tahun 2013 meningkat menjadi 4.419,77 milyar rupiah, tahun 2014 mencapai 4.645,42 milyar rupiah, dan pada tahun 2015 mencapai 4.868,95, tumbuh rata-rata sebesar 4,81 persen per tahun dan pada tahun 2015.

3.7.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator ekonomi makro sebagai ukuran tingkat kemakmuran suatu daerah dapat di lihat dari angka PDRB per kapita.

PDRB per kapita per tahun Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapanuli Utara terus mengalami peningkatan. Tahun 2011 PDRB per kapita sebesar Rp.14.829.241,70, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.16.115.964,89, meningkat lagi menjadi sekitar Rp.17.279.972,58 pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi Rp.18.509.155,15 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.19.864.253,52 Sementara itu, jika dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2011-2015 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Tahun 2011, PDRB perkapita Kabupaten Tapanuli Utara atas dasar harga konstan mencapai Rp.14.144.141,55, kemudian pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp.14.689.627,65, meningkat lagi menjadi sekitar Rp.15.323.719,27 pada tahun 2013, pada tahun 2014 menjadi Rp.15.971.111,92 dan pada tahun 2015 menjadi Rp.16.594.991,17.



BAB IV

PERKEMBANGAN

IPM

4.1. Perkembangan IPM

4.2. Peringkat IPM

BAB IV. PERKEMBANGAN IPM

Dalam analisis, angka IPM kurang memiliki makna apabila tidak menyertakan angka IPM tahun sebelumnya dan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam analisis IPM akan diketahui posisi pembangunan manusia baik antar waktu maupun antar wilayah .

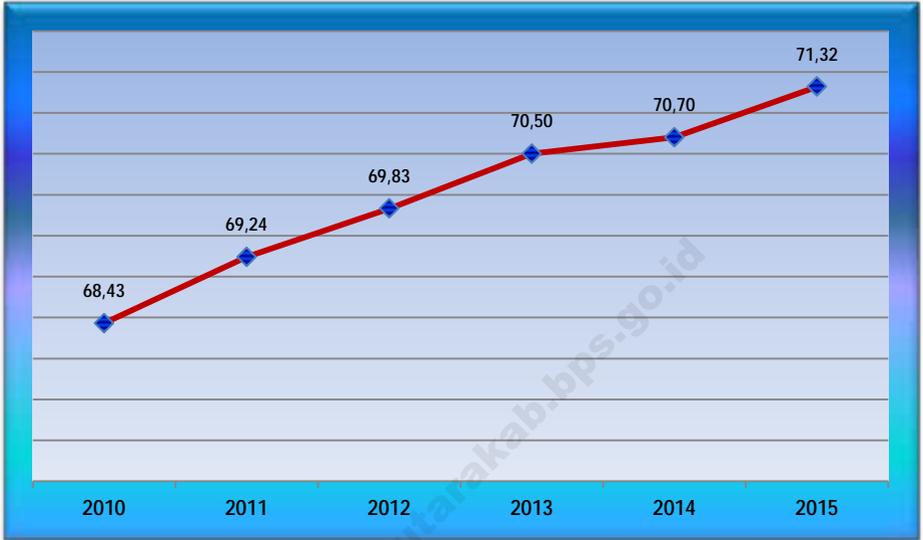
Data IPM menjadi sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan Pemerintah adalah penentuan Dana Perimbangan Wilayah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang menggunakan data IPM. Selain itu, IPM juga digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah.

Bab ini akan membahas mengenai perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara beserta komponennya, dan beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara.

4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum pembangunan manusia di Tapanuli Utara selama periode 2010-2014 mengalami peningkatan meskipun level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama. Perkembangan IPM Kabupaten Tapanuli Utara terlihat pada Grafik 4.1.

Grafik 4. 1.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 - 2015



Klasifikasi IPM Tapanuli Utara terlihat mengalami kenaikan setelah pasca krisis 1997 sampai 2000-an, dimana stabilitas ekonomi sudah mulai membaik, status IPM mengalami peningkatan dari 68,43 pada tahun 2010 (klasifikasi sedang), menjadi 69,24 pada tahun 2011 atau naik 0,81 poin dengan klasifikasi IPM kategori sedang, kemudian pada tahun 2012 meningkat lagi menjadi 69,83 (naik 0,59 poin) juga dengan klasifikasi sedang, pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 70,50 atau naik 0,67 poin (klasifikasi tinggi), pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 70,70 dengan klasifikasi tinggi dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 71,32 dengan klasifikasi tinggi.

Tabel 4.1
Perkembangan Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010 - 2015

Tahun	IPM	Klasifikasi
2010	68,43	Sedang
2011	69,24	Sedang
2012	69,83	Sedang
2013	70,50	Tinggi
2014	70,70	Tinggi
2015	71,32	Tinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini menunjukkan betapa masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara jauh lebih produktif dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Tetapi angka ini masih **belum** berada pada klasifikasi sangat tinggi, berarti masih harus lebih ditingkatkan untuk pembangunan manusianya agar produktivitas masyarakat semakin meningkat dan bermanfaat bagi modal pembangunan Kabupaten Tapanuli Utara dan bukan menjadi beban pembangunan.

4.2. Peringkat IPM

Sebagai ukuran kemajuan pembanguan manusia di suatu negara atau daerah, Indek Pembangunan Manusia (IPM) biasanya digunakan untuk mengkaji kemajuan pembanguan manusia dalam dua aspek. Aspek pertama perbandingan wilayah relatif terhadap wilayah

yang lain berdasarkan besaran IPM yang dihitung berdasarkan komponen-komponen IPM yang disusun suatu peringkat kemajuan pembangunan manusia dipelbagai wilayah dalam kawasan yang sama. Aspek yang lain adalah mengkaji kemajuan dari pencapaian setelah berbagai program diimplementasikan dalam suatu periode.

Peringkat IPM Tapanuli Utara pada tahun 2015 berada di peringkat ke 10 dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara (tabel 4.2). Kabupaten/kota yang peringkatnya berada di atas Tapanuli Utara secara berurut adalah Medan (78,87), Pematang Siantar (76,34), Binjai (73,81), Toba Samosir (73,40), Tebing Tinggi (72,81), Padang Sidempuan (72,80), Deli Serdang (72,79), Karo (72,69), dan Sibolga (71,64).

Jika dibandingkan dengan data IPM Sumatera Utara, maka angka IPM Tapanuli Utara masih berada di atas IPM Sumatera Utara yaitu 69,51 dan peringkat IPM Sumatera Utara adalah urutan 10 di Indonesia.

Tabel 4.2 Nilai dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2015

No	Provinsi	IPM		Peringkat IPM	
		2014	2015	2014	2015
SUMATERA UTARA		68.87	69.51	10	10
1	Nias	57.98	58.85	31	31
2	Mandailing Natal	63.42	63.99	29	29
3	Tapanuli Selatan	67.22	67.63	20	20
4	Tapanuli Tengah	66.16	67.06	22	22
5	Tapanuli Utara	70.70	71.32	11	10
6	Toba Samosir	72.79	73.40	3	4
7	Labuhan Batu	70.06	70.23	12	12
8	Asahan	67.51	68.40	19	18
9	Simalungun	70.89	71.24	10	11
10	Dairi	67.91	69.00	16	15
11	Karo	71.84	72.69	8	8
12	Deli Serdang	71.98	72.79	6	7
13	Langkat	68.00	68.53	15	16
14	Nias Selatan	57.78	58.74	32	32
15	Humbang Hasundutan	65.59	66.03	25	25
16	Pakpak Barat	65.06	65.53	28	28
17	Samosir	67.80	68.43	17	17
18	Serdang Bedagai	67.78	68.01	18	19
19	Batu Bara	65.50	66.02	26	26
20	Padang Lawas Utara	66.50	67.35	21	21
21	Padang Lawas	65.50	65.99	27	27
22	Labuhan Batu Selatan	68.59	69.67	14	14
23	Labuhan Batu Utara	69.15	69.69	13	13
24	Nias Utara	59.18	59.88	30	30
25	Nias Barat	57.54	58.25	33	33
26	Kota Sibolga	71.01	71.64	9	9
27	Kota Tanjung Balai	66.05	66.74	23	23
28	Kota Pematang Siantar	75.83	76.34	2	2
29	Kota Tebing Tinggi	72.13	72.81	5	5
30	Kota Medan	78.26	78.87	1	1
31	Kota Binjai	72.55	73.81	4	3
32	Kota Padang Sidempuan	71.88	72.80	7	6
33	Gunung Sitoli	65.91	66.41	24	24

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

BAB V

KONDISI

KOMPONEN IPM

5.1. Indeks Pengetahuan

5.2. Indeks Kelangsungan Hidup

5.3. Indeks Daya Beli

BAB V. KONDISI KOMPONEN IPM

Perkembangan angka IPM dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen/*rate* dari komponen IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil perkapita.

5.1. Indeks Pengetahuan

Peningkatan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada upaya pembangunan di bidang pendidikan. Semenjak awal tahun 1990-an pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 6 Tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi wajib belajar 9 tahun pada tahun 1994, diharapkan meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah dalam pendidikan dasar. Hal ini sesuai dengan salah satu amanat yang diemban pemerintah sesuai dengan UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak upaya pemerintah dalam upaya melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang telah bertekad memberhasikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya dari aspek pendidikan.

Tabel 5.1. Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
	SUMATERA UTARA	68.29	12.82	9.03	9,563
1	Nias	68.97	11.77	4.76	6,234
2	Mandailing Natal	61.58	12.77	7.63	9,096
3	Tapanuli Selatan	63.74	13.06	8.27	10,623
4	Tapanuli Tengah	66.59	12.40	8.02	9,555
5	Tapanuli Utara	67.55	13.19	9.31	11,079
6	Toba Samosir	69.14	13.18	10.08	11,535
7	Labuhan Batu	69.36	12.57	8.75	10,356
8	Asahan	67.37	12.49	8.32	10,067
9	Simalungun	70.34	12.69	8.80	10,728
10	Dairi	67.78	12.80	8.69	9,708
11	Karo	70.62	12.22	9.50	11,800
12	Deli Serdang	71.00	12.52	9.48	11,359
13	Langkat	67.63	12.70	7.92	10,364
14	Nias Selatan	67.66	11.96	4.64	6,454
15	Humbang Hasundutan	68.10	13.15	8.90	6,889
16	Pakpak Barat	64.85	13.80	8.45	7,496
17	Samosir	70.26	13.41	8.84	7,698
18	Serdang Bedagai	67.47	12.31	8.08	10,110
19	Batu Bara	65.80	11.96	7.74	9,692
20	Padang Lawas Utara	66.50	11.87	8.91	9,363
21	Padang Lawas	66.31	12.91	8.40	7,955
22	Labuhan Batu Selatan	68.09	12.73	8.68	10,319
23	Labuhan Batu Utara	68.70	12.12	8.31	11,201
24	Nias Utara	68.59	12.40	6.06	5,627
25	Nias Barat	67.94	12.33	5.74	5,207
26	Kota Sibolga	67.70	13.10	9.85	10,765
27	Kota Tanjung Balai	61.90	12.40	9.12	10,326
28	Kota Pematang Siantar	72.29	13.99	10.73	11,388
29	Kota Tebing Tinggi	70.14	12.23	10.06	11,393
30	Kota Medan	72.28	13.97	11.00	14,191
31	Kota Binjai	71.59	13.56	10.28	10,098
32	Kota Padang Sidempuan	68.32	14.48	10.47	9,668
33	Kota Gunung Sitoli	70.29	13.65	8.18	6,742

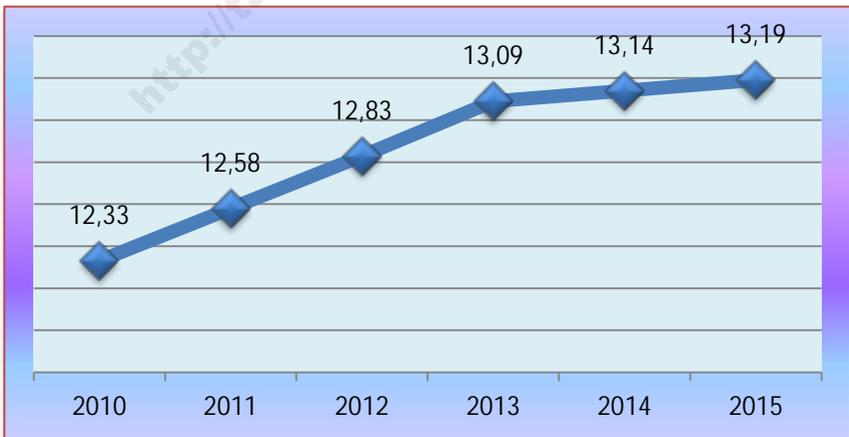
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Berkaitan dengan penentuan IPM, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu komponen pembentuk IPM adalah indeks pengetahuan. Indeks pengetahuan itu sendiri terdiri dari harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.

Dari tabel 5.1. bisa dilihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara berada diperingkat 8 untuk harapan lama sekolah, sedangkan yang berada diperingkat 1-7 adalah Padang Sidempuan (14,48), Pematang Siantar (13,99), Medan (13,97), Pakpak Bharat (13,80), Gunung Sitoli (13,65), Binjai (13,56), dan Samosir (13,41).

Jika dibandingkan dengan Sumatera Utara, maka harapan lama sekolah penduduk Tapanuli Utara (13,19), sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara yaitu sebesar 12,82 tahun.

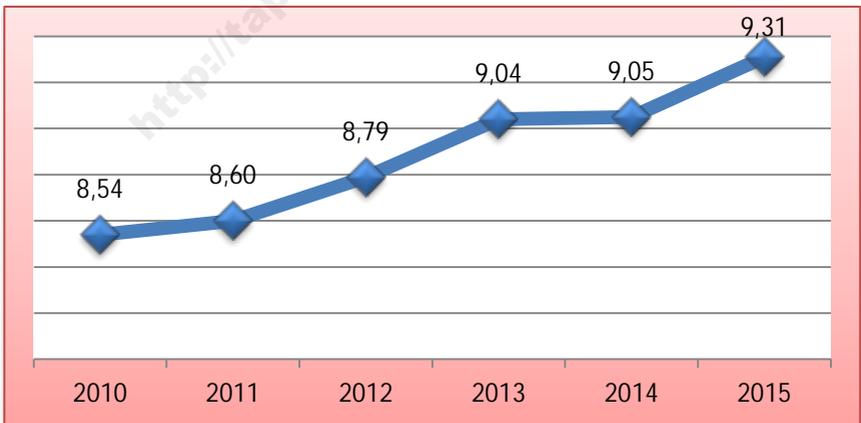
Grafik. 5.1. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



Jika dilihat grafik 5.1. perkembangan harapan lama sekolah tahun 2010 meningkat sampai tahun 2015.

Ukuran lain dari tingkat pendidikan yang menjadi salah satu indikator dari IPM adalah rata-rata lama sekolah. Secara umum indikator ini menunjukkan rata-rata jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 9,31 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Tapanuli Utara sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama bahkan sudah duduk di kelas 1 SMA. Ini menjelaskan bahwa program wajib belajar 9 tahun sudah berjalan dengan baik. Dari tahun 2010 ke tahun 2015, rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapanuli Utara mengalami perkembangan yang cukup bagus, dari 8,54 tahun menjadi 9,31 tahun.

Grafik. 5.2. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Utara, untuk rata-rata lama sekolah maka Kabupaten Tapanuli Utara berada pada peringkat 10, kabupaten/kota yang berada diperingkat di atasnya adalah Medan (11,00), Pematang Siantar (10,73), Padang Sidempuan (10,47), Binjai (10,28), Toba Samosir (10,08), Tebing Tinggi (10,06), Sibolga (9,85), Karo (9,50), dan Deli Serdang (9,48). Sedangkan rata-rata Sumatera Utara adalah 9,03 tahun.

5.2. Indeks Kelangsungan Hidup

Kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dapat dipandang dari aspek fisik dan non fisik yang tentu keduanya saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Salah satu indikator utama dalam mengukur derajat kesehatan penduduk secara makro adalah angka harapan hidup waktu lahir. Angka harapan hidup ini memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara makro. Kebijakan peningkatan kesehatan sejak orde baru sampai sekarang antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup penduduk. Semakin tinggi angka harapan hidup menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat secara umum semakin meningkat.

Dari hasil perhitungan, menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Tapanuli Utara dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun 2010 sebesar 66,76 tahun, tahun 2011 sebesar 66,91 tahun, tahun 2012 sebesar 67,05 tahun, tahun 2013 sebesar 67,15 tahun, tahun 2014 sebesar 67,25 tahun, dan tahun 2015 sebesar 67,55 tahun. AHH penduduk Tapanuli Utara pada tahun 2015 masih lebih rendah dari rata-rata AHH Sumatera Utara (68,29 tahun).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, tahun 2014 Tapanuli Utara hanya bisa berada di peringkat 23. Kabupaten/Kota di peringkat atas adalah Pematang Siantar (72,29), Medan (72,28), Binjai (71,59), Deli Serdang (71,00), Karo (70,62), Simalungun (70,34), Gunung Sitoli (70,29), Samosir (70,26), Tebing Tinggi (70,14), Labuhan Batu (69,36), Toba Samosir (69,14), Nias (68,97), Labuhan Batu Utara (68,70), Nias Utara (68,59), Padang Sidempuan (68,32), Humbang Hasundutan (68,10), Labuhan Batu Selatan (68,09), Nias Barat (67,94), Dairi (67,78), Sibolga (67,70), Nias Selatan (67,66), dan Langkat (67,63).

Grafik 5.3. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2010-2015



5.3. Indeks Daya Beli

Indeks daya beli digunakan untuk mengukur standar hidup layak. Indikator ini dipengaruhi pengetahuan yang dimiliki serta peluang yang ada untuk merealisasikan.

Pengetahuan dalam berbagai barang/jasa sebagai pendapatan. Sehingga dengan pendapatan yang ada manusia dapat menciptakan daya beli untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam penghitungan indeks daya beli digunakan pendekatan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi di daerah masing-masing.

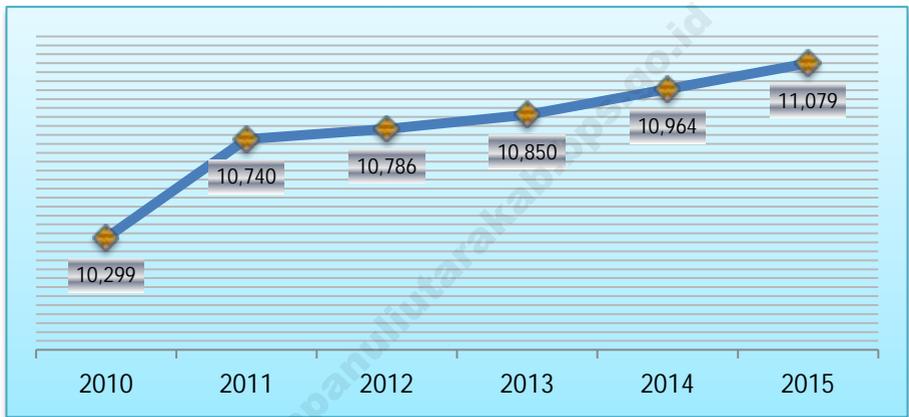
Penyesuaian ini diperlukan untuk menstandarkan tingkat harga di masing-masing daerah. Tingkat pengeluaran perkapita yang sama di suatu daerah belum tentu menunjukkan daya beli terhadap barang dan jasa yang sama karena tingkat harga di setiap daerah itu berbeda, oleh sebab itulah pengeluaran perkapita ini terlebih dahulu disesuaikan untuk dapat mengukur tingkat daya beli yang nyata.

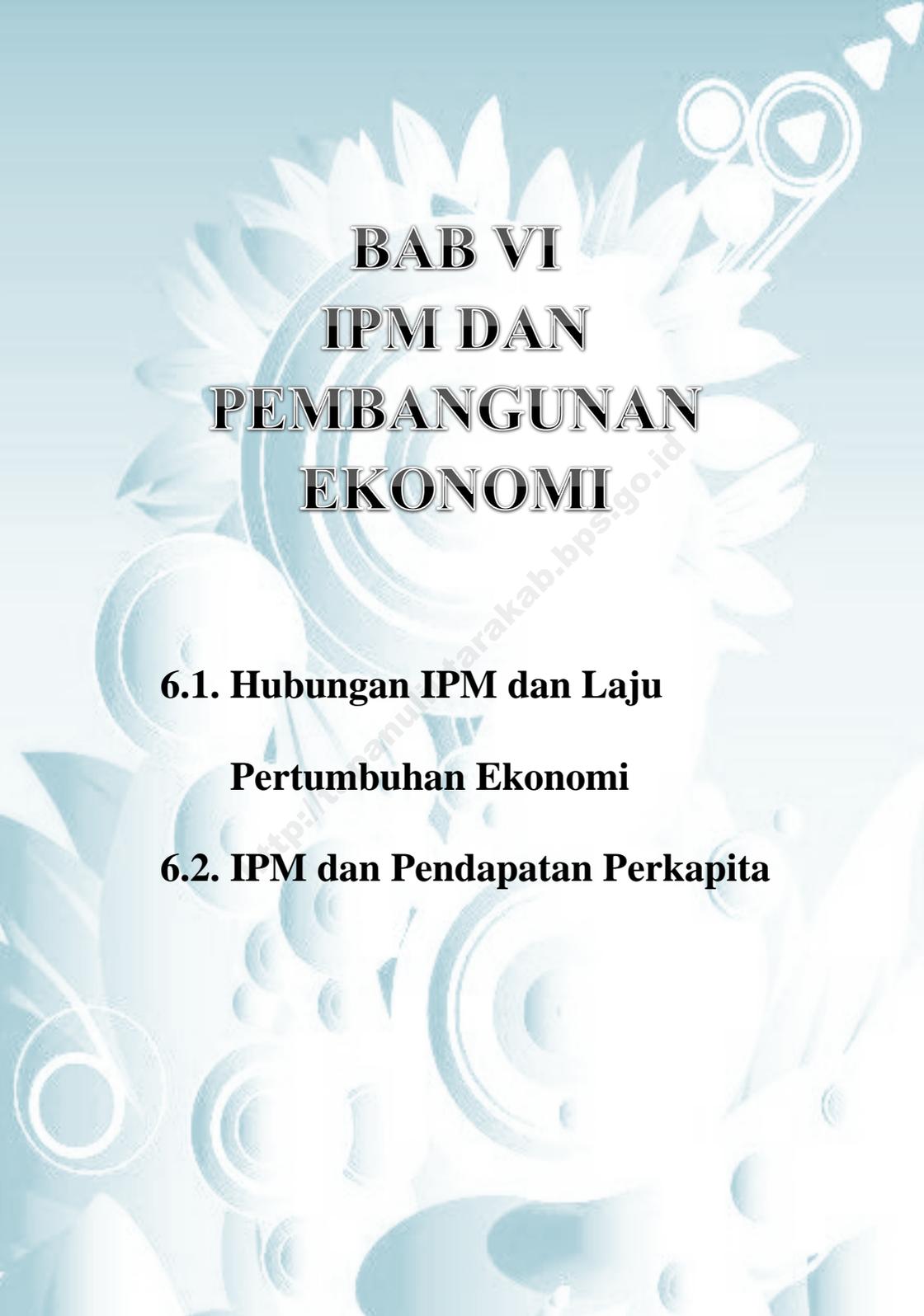
Dari hasil penghitungan, tingkat daya beli penduduk Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2010 sampai tahun 2015 terus meningkat. Pada tahun 2010 menjadi 10,299 juta rupiah, meningkat tahun 2011 menjadi 10,740 juta rupiah, tahun 2012 meningkat menjadi 10,786 juta rupiah, tahun 2013 juga meningkat menjadi 10,850 juta rupiah, pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 10,964 juta rupiah, dan tahun 2015 juga meningkat kembali menjadi 11,079 juta rupiah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara maka Tapanuli Utara berada di peringkat ke-8, setelah Medan

(14,191 juta rupiah), Karo (11,800 juta rupiah), Toba Samosir (11,535 juta rupiah), Tebing Tinggi (11,393 juta rupiah), Pematang Siantar (11,388 juta rupiah), Deli Serdang (11,359 juta rupiah), dan Labuhan Batu Utara (11,201 juta rupiah). Sedangkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 9,563 juta rupiah.

Grafik 5.4. Rata-rata pengeluaran terkoreksi 2010-2015 (juta rupiah)





BAB VI

IPM DAN

PEMBANGUNAN

EKONOMI

6.1. Hubungan IPM dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi

6.2. IPM dan Pendapatan Perkapita

BAB VI. IPM DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dapat ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang akan dicantumkan dalam pola dasar pembangunan daerah yang akan datang. Hal ini akan merupakan langkah penting karena IPM merupakan salah satu faktor yang menduduki salah satu posisi penting dalam pelaksanaan manajemen pembangunan daerah. Oleh karena pelaksanaan pembangunan (arti luas), juga meliputi unsur pemantauan, dan evaluasi maka fungsi IPM dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya pembangunan yang terarah.

Sebaiknya daerah yang telah memiliki PDRB yang sudah relatif baik fungsi pembangunan adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya tetap kondusif bagi kenaikan IPM yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja

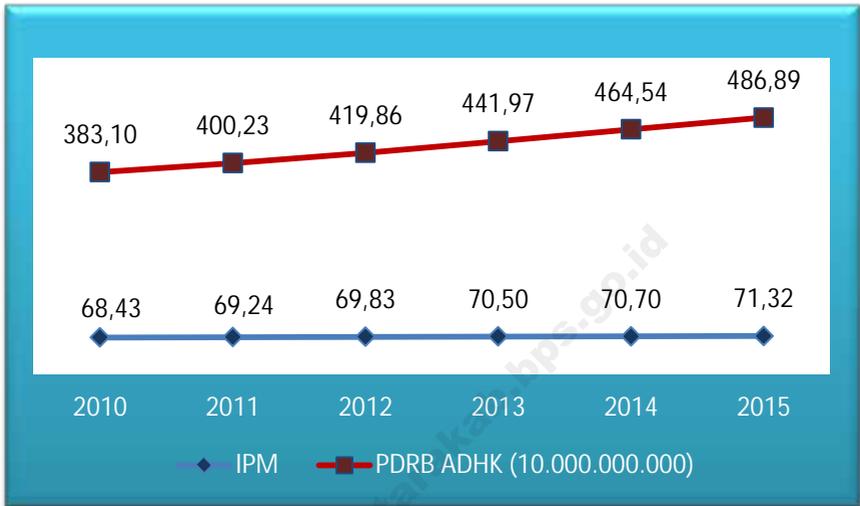
6.1. Hubungan IPM dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi atau khususnya pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang timbal balik dengan pembangunan manusia. Artinya pembangunan ekonomi yang mantap menjadi prasyarat untuk melaksanakan pembangunan manusia. Suatu wilayah akan sangat sulit melaksanakan pembangunan manusia jika dalam kondisi perekonomian tidak menentu (labil), seperti yang terjadi di

Indonesia pada saat krisis ekonomi. Demikian pula secara tidak langsung pembangunan manusia ini juga memengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan manusia menempatkan manusia itu sendiri sebagai input, dimana nantinya dihasilkan suatu produk berupa sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi. Kuatnya hubungan timbal balik tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh kelembagaan pemerintah karena keberadaannya sangat menentukan implementasi kebijakan publik. Oleh sebab itu pemerintah daerah sebagai tempat lahirnya kebijakan pembangunan termasuk pembangunan manusia dituntut sangat berperan terhadap berhasil tidaknya pembangunan daerahnya.

Hubungan laju pertumbuhan ekonomi (yang dihitung dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dan pembangunan manusia seperti terlihat pada grafik 6.1 adalah hubungan yang tidak linier. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang memiliki peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati peringkat yang tinggi juga menurut PDRB. Walaupun kenaikan PDRB tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada kecenderungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena diasumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Tapanuli Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Grafik 6.1.
Perkembangan IPM dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Tapanuli Utara 2010-2015



Jika dilihat grafik 6.1. maka bisa disimpulkan bahwa walaupun IPM dan PDRB atas dasar harga konstan bergerak secara linier, tetapi kecepatan kenaikannya berbeda dimana PDRB atas dasar harga konstan sangat cepat kenaikannya jika dibandingkan dengan kenaikan IPM.

6.2 IPM dan Pendapatan Perkapita

Hubungan timbal balik, walaupun tidak bersifat otomatis, antara pembangunan manusia dan pertumbuhan terlihat pada grafik 6.2 yang mengkaitkan secara visual antara IPM dengan PDRB per kapita. Pada tabel tersebut terlihat bahwa hubungan itu tidak linier tetapi mengikuti suatu pola yang secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut :

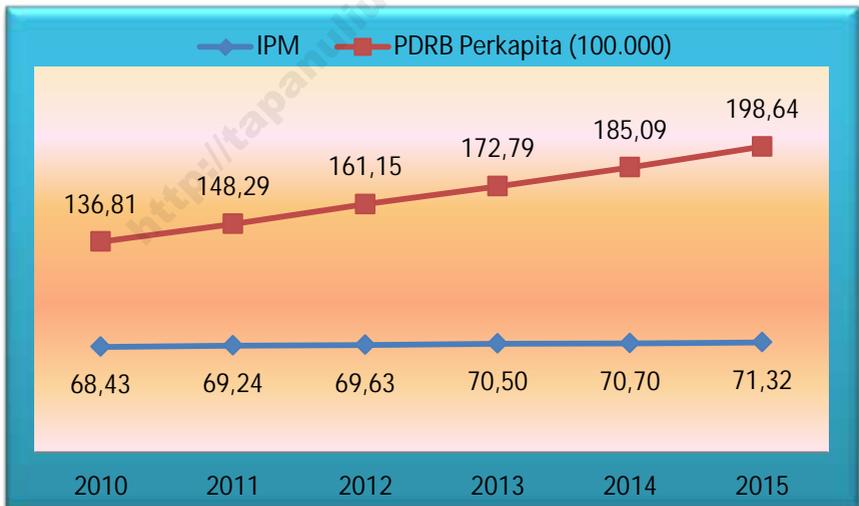
bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah akan berusaha meningkatkan pertumbuhannya dan kenaikan angka tersebut cenderung akan diikuti oleh kenaikan IPM secara cepat. Tetapi bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang relatif tinggi maka tidak selalu kenaikan PDRB per kapita yang tinggi tersebut akan diikuti oleh kenaikan IPM yang tinggi juga. Karena jika kenaikan PDRB tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas manusia maka kenaikan PDRB tersebut tidak akan menghasilkan perubahan pembangunan manusia.

Implikasi dari pola hubungan tersebut adalah bahwa bagi kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita rendah maka tantangan untuk meningkatkan IPM secara efektif harus dilakukan melalui upaya peningkatan PDRB per kapita. Sebaliknya bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki PDRB per kapita yang sudah relatif tinggi, maka tantangan yang dihadapi adalah mengupayakan agar pola pertumbuhan ekonominya kondusif bagi kenaikan IPM, yaitu melalui kebijakan yang menghasilkan pertumbuhan yang merata secara sektoral dan positif terhadap penciptaan lapangan kerja sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja (angkatan kerja) dan mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhannya seperti : sekolah, kesehatan, kehidupan yang layak, dan lain-lain.

Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia seperti terlihat pada grafik 6.2 adalah hubungan IPM dengan PDRB perkapita tidaklah linear. Ini terlihat pada daerah kabupaten/kota yang menempati peringkat tinggi menurut IPM belum tentu menempati

peringkat yang tinggi juga menurut PDRB perkapita. Walaupun kenaikan PDRB perkapita tidak selalu diikuti dengan kenaikan IPM, tetapi ada kecenderungan kenaikan IPM akan diikuti oleh peningkatan PDRB karena diasumsikan manusia yang berkualitas memungkinkan menghasilkan produktivitas tinggi. Dan seperti itu juga keadaan di Tapanuli Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 bahwa kenaikan IPM sejalan dengan kenaikan PDRB perkapita, walaupun dalam hal ini nilai IPM dan PDRB perkapita sama-sama mengalami kenaikan namun tidak selamanya berarti bahwa PDRB perkapita yang tinggi menjamin akan diikuti oleh nilai IPM yang tinggi juga atau dengan kata lain PDRB perkapita dan IPM tidak dapat ditukar.

Grafik 6.2.
Perkembangan IPM dan PDRB per Kapita
Kabupaten Tapanuli Utara 2010 – 2015





BAB VII

KESIMPULAN

DAN

SARAN

7.1 Kesimpulan

7.2 Rekomendasi

7.3 Saran-saran

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun masih belum merupakan ukuran yang menyeluruh IPM atau *Human Development Index* (HDI) dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara atau daerah dalam bidang pembangunan manusia.
2. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia yang perlu mendapat perhatian yaitu: produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
3. Pada tahun 2015 Harapan Lama Sekolah penduduk Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, yaitu masing-masing 13,19 tahun dan 12,82 tahun.
4. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (15 tahun ke atas) tahun 2015 di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 9,31 tahun, yang berarti secara umum penduduk di Tapanuli Utara sudah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama, bahkan telah rata-rata menduduki kelas 1 SMA, dan ini juga menunjukkan program wajib belajar 9 tahun telah tercapai.

5. Tingkat kesehatan makro penduduk Tapanuli Utara pada tahun 2015 masih lebih rendah jika dibanding dengan kondisi Sumatera Utara secara umum. Hal ini dicerminkan oleh angka harapan hidup penduduk Tapanuli Utara yang masih lebih rendah, yaitu masing-masing 68,29 tahun (Sumatera Utara) dan 67,55 tahun (Tapanuli Utara).
6. Standar hidup penduduk Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding rata-rata penduduk Sumatera Utara, hal ini dicerminkan melalui tingkat daya beli penduduk Tapanuli Utara yang lebih tinggi dari penduduk Sumatera Utara secara umum, yaitu masing-masing 11,079 juta rupiah dan 9,563 juta rupiah.
7. Status pembangunan manusia di Tapanuli Utara pada tahun 2015 berada pada klasifikasi tinggi, yaitu pada poin 71,32, atau lebih tinggi dibandingkan status pembangunan manusia Sumatera Utara yang mencapai poin 69,51 (klasifikasi sedang).
8. Terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti dalam hal pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi. Khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Tapanuli Utara dalam tiga tahun terakhir (2013-2015), level status pembangunan telah berada pada klasifikasi tinggi, yaitu tercatat sebesar 70,50 pada tahun 2013, 70,70 pada tahun 2014 dan 71,32 tahun 2015.
9. Hubungan pertumbuhan ekonomi dengan IPM tidak berjalan secara otomatis, dan bersifat linier. Ada

kecenderungan dalam jangka panjang peningkatan nilai IPM akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

7.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan rekomendasi terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dalam pembuatan kebijakan khususnya di bidang pembangunan manusia adalah :

1. Perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, sejalan dengan visi, misi dan tiga pilar pembangunan yang telah ditetapkan guna mencapai wajib belajar 9 tahun. Dengan demikian diharapkan pendidikan dapat menjadi modal dasar dan motor bagi penduduk Tapanuli Utara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Tapanuli Utara ke depan.
2. Seiring dengan perhatian pada sektor pendidikan, sektor kesehatan juga harus terus menerus diberi perhatian guna meningkatkan kualitas kesehatan penduduk Tapanuli Utara.
3. Perlunya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Mengingat pembangunan ekonomi Tapanuli Utara lebih terfokus kepada ekonomi kerakyatan, maka konsep pemberdayaan, produktivitas, pemerataan, dan kesinambungan sangat tepat diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan ekonomi yang juga merupakan bagian dari pembangunan manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

manusia mempunyai korelasi–interaksi, oleh karenanya kebijakan menjaga keseimbangan diantara keduanya perlu mendapat perhatian.

7.3. Saran-saran

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara adalah :

1. Pencegahan (berkurangnya) penduduk keluar dari Tapanuli Utara khususnya penduduk kelompok usia produktif dapat dilakukan melalui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan mengundang penanam modal untuk berusaha di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat mengolah sumber daya yang ada dengan baik yang sekaligus dapat menyerap banyak tenaga kerja serta merangsang tumbuhnya berbagai usaha lainnya yang saling berhubungan dan menguntungkan.
2. Perlunya peningkatan pendidikan secara terus menerus sebagai usaha untuk meningkatkan taraf kualitas penduduk, baik pendidikan formal maupun informal yang dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Tapanuli Utara sudah lebih tinggi dibanding Sumatera Utara, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk yang berpendapatan masih relatif rendah dalam

rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan yang lebih layak haruslah menjadi perhatian khusus Pemerintah.

<http://tapanuliutarakab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TAPANULI UTARA
JL. Sutan Sumurung Lumbantobing No. 7 Tarutung
Telp. (0633) 21153, Fax. (0633) 21755, Email : bps1205@bps.go.id
Homepage : <http://tapanuliutarakab.bps.go.id>